

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

---

**EVALUASI TUGAS PENDAMPING LOKAL DESA DALAM UPAYA  
PEMBANGUNAN DESA DI KAMPUNG TELUK RIMBA KECAMATAN  
KOTO GASIB KABUPATEN SIAK**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik  
Universitas Islam Riau*



**IYUSNIA**

**NPM:177310732**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
PEKANBARU**

**2021**

## PERSEMBAHAN

Karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk naskah skripsi yang sederhana ini Aku persembahkan sebagai tanda bakti dan ucapan terima kasihku kepada segenap hamba Allah yang telah banyak berjasa dalam perjalanan kehidupanku selama ini. Khusus untuk Ayahanda **ZUBER** bersama Ibunda **MIJAWATI** yang tercinta.

Terima kasih atas limpahan kasih sayang yang tiada terbatas, yang telah diberikan kepadaku.

Semoga Allah Swt tetap melimpahkan rahmat dan karunia yang tiada terputus kepada kedua orang tuaku, Aamiin ...

Kepada yang tersayang Saudaraku yang telah membantuku baik materil maupun moril serta memotivasiku dalam menyelesaikan studi.

Terima Kasih atas semua bantuan yang telah diberikan, semoga Allah Swt mencatatnya sebagai amal baik dan membalasnya dengan rahmat dan karunia yang setimpal, Aamiin...

Skripsi ini juga aku persembahkan untuk orang-orang yang sering nanya “Kapan Wisuda?”

dan juga secara khusus skripsi ini aku persembahkan untuk Pendamping Hidupku (KELAK).

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*

Alhamdulillahirobbil' alamin dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT dengan rahmat dan nikmat yang diberikan-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini dengan judul **“Evaluasi Tugas Pendamping Lokal Desa dalam Upaya Pembangunan Desa di Teluk Rimba Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak”**, untuk dijadikan salah satu syarat meraih gelar sarjana strata satu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan di Universitas Islam Riau.

Sholawat serta salam tidak lupa pula dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menegakkan kalimatul yang haq didunia ini dan menjadi suri tauladan yang membawa perubahan bagi umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menyusun setiap lembar bab perbab usulan penelitian ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas. Walaupun demikian Penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah usulan penelitian ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu Penulis berharap kemakluman serta masukan dari Pembaca.

Melalui kata pengantar ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan motivasi sehingga

usulan penelitian ini dapat diselesaikan, ucapan terima kasih ini Penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H. Syafrinaldi, SH. M.CL Sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas sarana dan prasarana untuk menimba ilmu ditempat yang bapak pimpin.
3. Bapak Dr. Rangi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku ketua program studi ilmu pemerintahan yang telah memfasilitasi dan bersedia memberikan segala ilmu pengetahuan dan wawasan.
4. Bapak Andriyus S.Sos., M.Si., selaku Dosen yang telah membimbing, mengajarkan, dan memfasilitasi serta memberikan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan yang sangat berguna dimasa yang akan datang dan meluangkan waktunya serta memberikan banyak arahan kepada penulis untuk menyelesaikan usulan penelitian ini.
5. Bapak ibu Dosen khususnya dosen ilmu pemerintahan yang telah banyak memberikan nasihat dan ilmu pengetahuan selama masa studi.
6. Seluruh staf, karyawan/ti Tata Usaha (TU) fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Islam Riau, Perpustakaan ilmu sosial dan ilmu politik serta perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan usulan penelitian.

7. Untuk Forum Beasiswa Bidikmisi Dikti Universitas Islam Riau dan Seluruh teman seperjuangan di Organisasi Bidikmisi Universitas Islam Riau. Terima kasih atas bantuan materil dan moril yang sudah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi tepat pada waktunya dan tanpa ada hambatan biaya.
8. Untuk orang yang paling istimewa dalam hidup penulis. Pertama untuk kedua orangtua tercinta, yaitu Ayahanda Zuber dan Ibunda Mijawati. Kakak Sutriyani dan Abang Ipar Arman. Adik Alisa Safitri, Josinta, dan Habdul Hamid. Keponaan Abizard Altan Muttaqi, yang telah memberikan do'a, kasih sayang, serta dukungan yang diberikan kepada Penulis.
9. Kepada rekan-rekan seperjuangan dan teman-teman kelas IP A, serta sahabat seperjuangan Ria Maddalena Sinaga, Erika Lumban Gaol, Elsi Veronika Samosir, yang selalu menemani Penulis serta memberi dukungan yang tiada hentinya.

Penulis mendo'akan semoga jasa baik yang telah diberikan kepada yang telah disebutkan diatas dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal oleh Allah SWT. Terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu Penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini.

Pekanbaru, 26 Maret 2021

Penulis

Iyusnia

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xviii
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACT.....	xx
<b>BAB I      PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian.....	20
1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	20
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	20
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	20
<b>BAB II      STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA</b>	
<b>    PIKIR.....</b>	<b>21</b>
2.1 Studi Kepustakaan.....	21

2.1.1 Konsep Pemerintahan.....	21
2.1.2 Konsep Ilmu Pemerintahan.....	23
2.1.3 Konsep Evaluasi.....	25
2.1.4 Konsep Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah.....	29
2.1.5 Konsep Pemerintahan Desa.....	31
2.1.6 Konsep Pembangunan Desa.....	33
2.1.7 Konsep Pendamping Desa.....	35
2.2 Kerangka Pikir.....	38
2.3 Penelitian Terdahulu.....	40
2.4 Konsep Operasional.....	42
2.5 Operasional Variabel.....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
3.1 Tipe Penelitian.....	45
3.2 Lokasi Penelitian.....	46
3.3 Informan dan Key Informan.....	46
3.4 Teknik Penentuan Key Informan dan Informan.....	47
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	48
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.7 Teknik Analisis Data.....	50
3.8 Jadwal Penelitian.....	50
3.9 Rencana Sistematika Laporan Penelitian.....	51

<b>BAB VI</b>	<b>DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>53</b>
4.1	Gambaran Umum Desa Teluk Rimba.....	53
4.1.1	Geografis.....	53
4.1.2	Pemerintahan.....	54
4.1.3	Visi dan Misi Kantor Kecamatan Koto Gasib.....	57
4.1.4	Struktur Kantor Kecamatan Koto Gasib.....	58
4.1.5	Kependudukan.....	59
4.2	Gambaran Umum Desa Teluk Rimba .....	60
4.2.1	Geografis.....	60
4.2.2	Pemerintahan.....	61
4.2.3	Kependudukan.....	63
4.3	Gambaran Umum Pendampingan Desa.....	63
4.3.1	Struktur Pelaksanaan Pendampingan Desa.....	63
4.3.2	Profil Pendamping Desa Teluk Rimba.....	65
4.3.3	Pendamping Lokal Desa Teluk Rimba.....	67
<b>BAB V</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>68</b>
5.1	Identitas Informan.....	68
5.1.1	Jenis Kelamin Informan.....	69
5.1.2	Tingkat Pendidikan Informan.....	70

5.1.3 Tingkat Umur Informan.....	71
5.2 Hasil Penelitian tentang Evaluasi Tugas Pendamping Lokal Desa dalam Upaya Pembangunan Desa di Teluk Rimba.....	72
1 Efektifitas.....	73
2 Efisiensi.....	78
3. Kecukupan.....	81
4. Ketepatan.....	84
5. Responsivita.....	87
6. Perataan.....	92
5.3 Faktor Penghambat Tugas Pendamping Lokal Desa Dalam Upaya Pembangunan Desa Teluk Rimba Kecamatan Koto Gasib.....	96
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>98</b>
6.1 Kesimpulan.....	98
6.2 Saran.....	99
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>100</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>103</b>

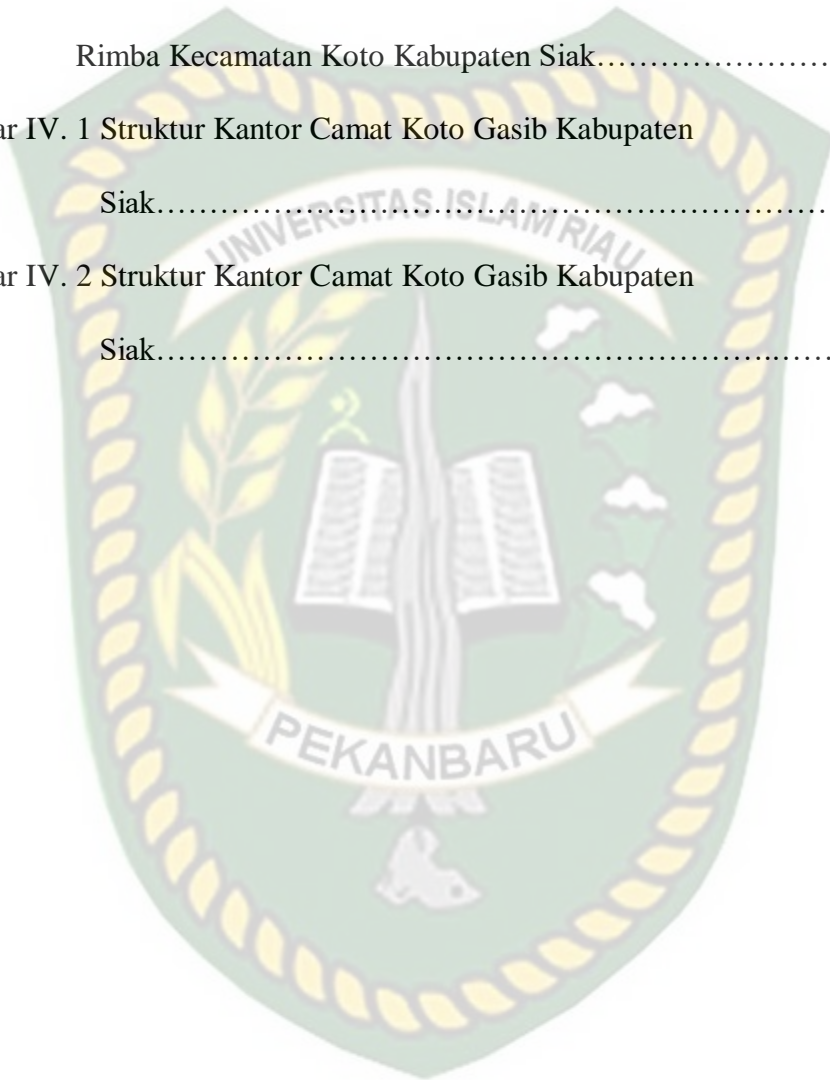
## DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Data Jumlah Pendamping Desa Di Kabupaten Siak.....	9
Tabel I.2 Penempatan Pendamping Lokal Desa di Kecamatan Koto Gasib.....	11
Tabel I.3 Nama-Nama Desa Berdasarkan Status Perkembangan Desa Di Kecamatan Koto Gasib.....	13
Tabel I.4 Klasifikasi Penduduk Desa Teluk Rimba Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Pekerjaan.....	16
Tabel 1. 5 Klasifikasi Data Penduduk Kurang Mampu di Desa Teluk Rimba Berdasarkan Bantuan Dana Sosial.....	17
Tabel I.6 Nama-Nama Pendamping Desa Di Teluk Rimba Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dan Jabatan.....	18
Table II.1 Kajian Penelitian Terdahulu yang Penelitiannya Menyangkut tentang Tugas Pendamping Desa.....	40
Tabel II.2. Operasional variabel penelitian Evaluasi tugas Pendamping Desa Dalam Upaya Pembangunan Desa di Teluk Rimba Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.....	44
Tabel III. 1 Tabel Key Informan dan Informan Penelitian di Kantor Desa Teluk Rimba Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.....	47
Tabel III.2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian tentang Evaluasi	

Tugas Pendamping Desa dalam Upaya Pembangunan Desa di Teluk Rimba Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.....	50
Tabel IV. 1 Klasifikasi Perangkat Pemerintahan Kecamatan Koto Gasib berdasarkan Pangkat dan Jabatan.....	55
Tabel IV. 2 Nama-Nama Desa di Kecamatan Koto Gasib Berdasarkan Status Perkembangannya.....	56
Tabel IV.3 Klasifikasi Jumlah Penduduk di Kecamatan Koto Gasib Berdasarkan Desa dan Jenis Kelamin.....	59
Tabel IV.4 Sungai-Sungai yang Berada di Wilayah Desa Teluk Rimba.....	60
Tabel VI. 5 Klasifikasi Perangkat Desa Teluk Rimba Berdasarkan Jabatan dan Tingkat Pendidikan .....	62
Tabel IV. 6 Klasifikasi Jumlah Penduduk Kampung Teluk Rimba Berdasarkan Pendidikan.....	63
Tabel VI. 7 Profil Pendamping Desa Teluk Rimba Kecamatan Koto Gasib.....	66
Tabel V.1 Identitas Informan Penelitian tentang Evaluasi Tugas Pendamping Lokal Desa dalam Upaya Pembangunan Desa di Teluk Rimba.....	69
Tabel V. 2 Jenis Kelamin Informan.....	70
Tabel V.3 Tingkat Pendidikan Informan.....	70
Tabel V.4 Tingkat Umur Informan.....	71

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pikir Tentang Evaluasi Tugas Pendamping Desa Dalam Upaya Pembangunan Desa di Teluk Rimba Kecamatan Koto Kabupaten Siak.....	39
Gambar IV. 1 Struktur Kantor Camat Koto Gasib Kabupaten Siak.....	58
Gambar IV. 2 Struktur Kantor Camat Koto Gasib Kabupaten Siak.....	64



**SURAT PENYATAAN KEASLIAN NASKAH**

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Iyusnia  
Npm : 177310732  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Penelitian : Evaluasi Tugas Pendamping Lokal Desa Dalam Upaya Pembangunan Ekonomi Desa Di Teluk Rimba Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.

Atas nama yang didaftarkan pada ujian Komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Universitas Islam Riau.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Pekanbaru, 1 Maret 2021



**Evaluasi Tugas Pendamping Lokal Desa  
dalam Upaya Pembangunan Desa di Teluk Rimba  
Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak**

**ABSTRAK**

**Iyusnia**

Penelitian ini dilatabelakangi oleh belum adanya perubahan yang signifikan yang ditunjukkan oleh Pendamping Lokal Desa dalam menjalankan tugasnya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan faktor pengambat tugas Pendamping Lokal Desa dalam Upaya Pembangunan Desa di Teluk Rimba Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini ialah Pendamping Lokal Desa di Teluk Rimba Kecamatan Koto Gasib masih belum memahami tugas dan fungsinya sebagai Pendamping Desa. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya perubahan yang signifikan yang dapat ditunjukkan oleh Pendamping Lokal Desa dalam Pembangunan Desa di Teluk Rimba. Selain itu Kurangnya koordinasi antara Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan Pendamping Lokal Desa di Teluk Rimba Kecamatan Koto Gasib. Hal ini dapat dilihat dari Kepala Desa yang merasa keberadaan Pendamping Lokal Desa tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kapasitas Perangkat Desa di Teluk Rimba.

**Kata Kunci: Evaluasi, Pendamping Lokal Desa, Pembangunan Desa.**

*Evaluation Task Local Companion Village  
in Rural Development Efforts in the Gulf Rimba  
Siak District of Koto Gasib*

**ABSTRACT**

*This research is by the absence of significant changes shown by the Local Companion Village in carrying out its duties to increase community participation in rural development. This study aims to identify and explain the factors inhibiting the task of Village Local Assistants in Village Development Efforts in Teluk Rimba, Koto Gasib District, Siak Regency. This research was conducted using qualitative research methods. Data collection techniques used in this research are interview techniques, observation, and documentation. The results of this study are the Village Local Assistants in Teluk Rimba, Koto Gasib District, still do not understand their duties and functions as Village Assistants. This can be seen from the absence of significant changes that can be demonstrated by the Local Village Facilitators in Village Development in Teluk Rimba. In addition, there is a lack of coordination between the Village Head and Village Officials with Village Local Assistants in Teluk Rimba, Koto Gasib District. This can be seen from the Village Head who feels that the existence of Village Local Assistants does not have a significant impact on increasing the capacity of Village Officials in Teluk Rimba.*

**Keywords:** *Evaluation, Local Companion Village, Village Development*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Di Indonesia pada saat ini, dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja organisasi perangkat daerah, pemerintah pusat telah mengeluarkan suatu kebijakan yaitu kebijakan otonomi daerah. otonomi daerah adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh daerah yang disebut dengan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, segala suatu urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat akan dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Sedangkan daerah otonom itu sendiri merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan adanya batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan didaerah itu sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa urusan pemerintahan terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

##### **1. Urusan Pemerintahan Absolut**

urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan ini terdiri dari:

- urusan pertahanan
- keamanan

- agama
- yustisi
- politik luar negeri
- moneter dan fiskal

## 2. Urusan Pemerintah Konkuren

urusan pemerintah konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dalam urusan ini terdiri dari urusan wajib dan urusan konkuren. Urusan wajib terbagi menjadi dua, yaitu urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib non pelayanan dasar. Urusan wajib pelayanan dasar terdiri dari urusan:

- Pendidikan
- Kesehatan
- Sosial
- pekerjaan umum dan penataan ruang
- perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- Ketentraman
- ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Selanjutnya urusan wajib non pelayanan dasar terdiri dari urusan:

- tenaga kerja
- pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

- pangan
- pertanahan
- lingkungan hidup
- administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- pemberdayaan masyarakat dan desa
- pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- perhubungan komunikasi dan informatika
- koperasi, usaha kecil dan menengah
- penanaman modal
- kepemudaan dan olahraga
- statistik
- persandian
- kebudayaan
- perpustakaan.

Sedangkan urusan pilihan merupakan urusan yang diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah itu sendiri. Urusan pilihan terdiri dari:

- kelautan dan perikanan
- pariwisata
- pertanian
- kehutanan

- energi dan sumber daya mineral
- perdagangan
- perindustrian
- transmigrasi.

3. Urusan Pemerintahan Umum, urusan pemerintahan umum merupakan urusan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Sejalan dengan diterapkannya sistem desentralisasi, dimana dalam sistem ini pemerintah pusat memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, menjelaskan bahwa setiap daerah sesuai karakter daerahnya akan mempunyai kelembagaan dan aturan kebijakan sesuai karakter daerah dan kebutuhan masyarakatnya. Setiap organisasi perangkat daerah baik itu dalam urusan wajib maupun urusan pemerintahan pilihan juga harus mempertimbangkan faktor jumlah penduduk, luasan wilayah, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam urusan konkuren sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Maka dalam urusan wajib non pelayanan dasar terdapat urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, yang mana desa ini merupakan satuan daerah terkecil dari daerah provinsi maupun kabupaten/kota yang ada diseluruh negara Indonesia yang sangat berperan besar dalam upaya peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Dalam

meningkatkan kualitas hidup untuk kesejahteraan masyarakat pemabangunan desa sangat penting dalam hal ini. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa pembangunan desa adalah upaya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat desa. Adapun tujuan dari pembangunan desa ini adalah untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menerangkan bahwa dalam upaya untuk mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah melakukan pendampingan desa yang dibantu oleh pendamping desa yang ditempatkan di kabupaten, kecamatan, dan desa. Dalam hal ini pendampingan desa dilaksanakan agar pemerataan pembangunan didesa dapat tercapai dengan cepat. Dengan adanya fasilitasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sanga diperlukan untuk mendorong prioritas penggunaan dana desa. Dengan demikian dana desa dapat dialokasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Pendamping desa dibentuk dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan desa agar kesejahteraan masyarakat desa dapat terwujud. Dengan adanya pendamping desa diharapkan dapat tercipta pembangunan yang partisipatif dari pemerintahan desa dan masyarakat. Dasar hukum dari Pendamping Desa ini adalah Peraturan Menteri

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015, namun seiring jalannya waktu, Pendamping Desa diatur kembali dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Desa.

Dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa pendampingan masyarakat desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa. Pemberdayaan masyarakat desa dalam hal ini adalah upaya dalam mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap, serta kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pendampingan desa dilakukan oleh tenaga pendamping profesional, yang mana tenaga pendamping profesional ini adalah orang yang memiliki kualifikasi dan kompetensi dibidang pendampingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Tenaga pendamping profesional ini direkrut oleh unit kerja yang menangani urusan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa pada kementerian, yang dibantu oleh perangkat daerah provinsi yang menangani urusan pemerintah daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Sedangkan hasil akhir dari rekrutmen akan ditetapkan oleh

Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa pada Kementerian.

Pada Pasal 17 dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Teringgal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Desa menyatakan bahwa tenaga pendamping professional itu terdiri dari:

- Pendamping Lokal Desa
- Pendamping Desa
- Pendamping Teknis
- Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat

Dalam hal ini tenaga pendamping professional berfungsi sebagai fasilitasi, edukasi, mediasi dan advokasi. Pendamping lokal desa bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kerja sama desa, pengembangan Badan Usaha Milik Desa, dan pembangunan berskala lokal desa. Adapun wilayah kerja pendamping local desa ini berada di desa.

Pendamping Desa bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kerja sama desa, pengembangan Badan Usaha Milik Desa, dan pembangunan yang berskala lokal desa. Selain itu, pendamping desa juga bertugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pendampingan desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral. Adapun wilayah kerja pendamping desa ini berada di Kecamatan dengan spesifikasi sesuai kebutuhan dan kondisi desa. Pendamping teknis

bertugas mendampingi desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral. Adapun wilayah kerja pendamping teknis ini berada di Kecamatan.

Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat terdiri atas Tenaga Ahli Kabupaten/Kota, Tenaga Ahli Provinsi, dan Tenaga Ahli Pusat.

Pendamping desa merupakan penggerak mekanisme dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan desa. Selain itu, dalam pemberdayaan sumber daya masyarakat dan pengembangan sumberdaya kelembagaan desa juga perlu untuk ditingkatkan. Maka dari itu, dalam upaya pembangunan desa pendamping desa harus melaksanakan tugasnya secara maksimal

Begitu pula dengan Pendamping desa yang ada di Kabupaten Siak merupakan program yang diharapkan dapat membantu untuk kemajuan pembangunan desa-desa diseluruh Kabupaten Siak. Dengan adanya Pendamping Desa diharapkan mampu meningkatkan kapasitas setiap desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa agar mampu menjadi masyarakat yang maju dan mandiri, baik itu dalam hal perekonomian maupun dalam hal pembangunan. Namun hal itu tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena di setiap desa diseluruh Kabupaten Siak tidak semua desa terdapat sumber daya perangkat desa yang sesuai dengan yang diharapkan, sehingga menyebabkan kinerja staff dalam kelembagaan tersebut tidak efektif dan efisien sehingga program-program pembangunan yang alokasikan tidak sesuai

dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu banyak desa di seluruh Kabupaten Siak yang tidak memiliki program pemberdayaan masyarakat, selain itu kondisi pembangunan yang belum terlaksana dengan baik dan belum merata disetiap desa sehingga hal itu dapat menimbulkan kesenjangan disetiap desa. Dengan demikian, tugas dan fungsi pendamping desa sangat berperan dalam hal ini. Maka dari itu, berikut ini adalah penjabaran jumlah dan klasifikasi pendamping desa di seluruh Kabupaten Siak:

**Tabel I.1 Data Jumlah Pendamping Desa di Kabupaten Siak**

No	Klasifikasi Pendamping Desa	Jumlah (Orang)
1.	Pendamping Desa Pengelolaan Keuangan Desa (ADK)	43
2.	Pendamping Desa Tenaga Ahli (PDTA)	6
3.	Pendamping Pemberdayaan Desa (PPD)	18
4.	Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI)	10
5.	Pendamping Lokal Desa (PLD)	31
<b>Jumlah</b>		<b>108</b>

*Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Kabupaten Siak, 2020*

Tenaga Pendamping Desa merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah sebagai perwujudan dalam pertanggungjawabannya melakukan tugas pembinaan dan pengawasan yang diharapkan mampu melakukan optimalisasi pembangunan desa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi:

“ Pemerintah, Pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota bertugas untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa”, yang mana hal ini dapat diartikan desa haruslah mendapatkan bimbingan, pembinaan,

serta pengawasan didalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanannya terhadap masyarakat sekaligus memberdayakan masyarakat itu sendiri.

Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 131 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tentang Pendamping Desa. Pemerintah dalam melaksanakan fungsi pendampingan berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa dalam Pasal 17 Ayat 1 menjelaskan bahwa dalam pendampingan desa terdapat tenaga pendamping professional yang terdiri dari:

- Pendamping Lokal Desa
- Pendamping Desa
- Pendamping Teknis
- Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat

Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat dijelaskan dalam Pasal 18 Ayat 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa yang berbunyi:

“Tenaga Pendamping Lokal Desa yang bertugas didesa untuk mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kerja sama desa, pengembangan Badan Usaha Milik Desa, dan pembangunan yang berskala lokal desa.

Pendamping Lokal Desa adalah sebuah jabatan sebagai pendamping desa dibawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Desa, yang bertugas untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat disebuah desa.

Berikut ini adalah data penempatan Pendamping Lokal Desa di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.

**Tabel I.2 Penempatan Pendamping Lokal Desa di Kecamatan Koto Gasib**

No	Nama Pendamping Lokal Desa	Lokasi Penempatan	
		Kampung	Kecamatan
1.	Setiyawan	Buatan I	Koto Gasib
		Buatan II	
		Teluk Rimba	
2.	Rudi Kurniawan	Empang Pandan	
		Keranji Guguh	
		Kuala Gasib	
		Tasik Seminai	
3.	Athma Gunawan	Pangkalan Pisang	
		Sengkemang	
		Sri Gemilang	
		Rantau Panjang	

*Sumber: Kantor Camat Koto Gasib, 2021*

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari Pendamping Lokal Desa dalam pembangunan desa, Pendamping Lokal Desa harus turut berkoordinasi dengan pihak kecamatan. Upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Pendamping Lokal Desa haruslah maksimal, karena Pendamping Lokal Desa merupakan suatu alat penggerak utama dalam sistem mekanisme pemerintahan desa. Dengan adanya Pendamping Lokal Desa dapat membantu meningkatkan kapasitas dari desa untuk memajukan dan mensejahterakan seluruh masyarakat desa.

Namun pada saat ini terdapat perubahan nama desa di kecamatan Koto Gasib, perubahan ini berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung, hal ini dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat 1 dan 2, yang berbunyi:

“Perubahan penamaan desa menjadi kampung bertujuan untuk melestarikan penamaan lama yang pernah digunakan sebelum terbentuknya Kabupaten Siak. Perubahan sebagai mana yang dimaksud dalam rangka menata kembali penamaan dalam bahasa melayu untuk desa dengan sebutan kampung di Kabupaten Siak”.

Dengan ditetapkan peraturan daerah ini maka seluruh desa yang ada di Kabupaten Siak berubah penamaannya dan sebutannya menjadi kampung, termasuk desa terdapat di Kecamatan Koto Gasib. Kembali pada Pendamping Lokal Desa yang ada di Kecamatan Koto Gasib merupakan program yang sangat diharapkan untuk kemajuan pembangunan Kampung hal ini disebabkan di Kecamatan Koto Gasib hanya terdapat dua Kampung yang sudah termasuk Kampung Swasembada. Sedangkan sembilan Kampung yang lainnya masih dikategorikan sebagai Kampung Swakarya.

Kampung Swasembada adalah sebuah Kampung dengan masyarakatnya dikategorikan telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional, menurut perkembangannya kampung ini dapat dikategorikan kampung maju. Sedangkan kampung Swakarya merupakan sebuah kampung yang letaknya jauh dari pusat perekonomian, namun masyarakat kampung Swakarya ini sudah mulai mampu

meningkatkan taraf kehidupannya dengan hasil kerjanya sendiri. Menurut perkembangannya kampung ini dapat dikategorikan kampung berkembang. Maka dari itu, berikut adalah penjabaran jumlah kampung di Kecamatan Koto Gasib berdasarkan status perkembangannya dapat dilihat di tabel dibawah ini:

**Tabel I.3 Nama-Nama kampung Berdasarkan Status Perkembangan kampung di Kecamatan Koto Gasib.**

No	Nama Kampung	Status Perkembangan
1.	Empang Pandan	Swasembada
2.	Keranji Guguh	Swasembada
3.	Buatan I	Swakarya
4.	Buatan II	Swakarya
5.	Kuala Gasib	Swakarya
6.	Pangkalan Pisang	Swakarya
7.	Rantau Panjang	Swakarya
8.	Sengkemang	Swakarya
9.	Sri Gemilang	Swakarya
10.	Tasik Semina	Swakarya
11.	Teluk Rimba	Swakarya

*Sumber: Kantor Camat Kecamatan Koto Gasib, 2020.*

Berdasarkan tabel diatas, di Kecamatan Koto Gasib terdapat 11 kampung, dengan sembilan kampung yang masih dikategorikan desa berkembang. Hal ini seharusnya menjadi perhatian Pendamping Lokal Desa untuk mempercepat pembangunan desa.

Dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, pasal 1 menjelaskan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat dan kehidupan untuk kemakmuran masyarakat desa dengan mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui

meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kesadaran, dan memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, menjelaskan dalam Pasal 57 bahwasannya pelaksanaan kegiatan pembangunan desa mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Dalam Pasal 76 juga menjelaskan bahwa program dari kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yaitu program dan kegiatan dalam lingkup pengembangan kapasitas masyarakat dan pemerintahan desa dalam pembangunan desa yang meliputi: pendidikan dan pembelajaran, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan.

Pasal 9 Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan, dan Pembangunan Desa Provinsi Riau menjelaskan bahwa bidang pembangunan masyarakat pedesaan itu memiliki dua tugas pokok, yaitu menyelenggarakan urusan pada subbidang infrastruktur sarana dan prasarana desa dan subbidang pembangunan ekonomi masyarakat desa.

Berdasarkan observasi yang dapat kita lihat pada saat ini masih banyak pedesaan yang belum beranjak dari profil lama yakni terbelakang atau masih dikategorikan

belum maju. Meskipun desa diakui mempunyai peranan besar bagi kota, namun tetap saja masih dipandang rendah dalam hal ekonomi atau hal lainnya. Padahal dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan dan berprofesi sebagai petani kecil. Oleh karena itu, sudah sangat wajar bila pembangunan pedesaan harus menjadi prioritas utama dalam segenap rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia. Jika tidak maka kesenjangan antara kota dan desa akan semakin tinggi terutama dalam hal perekonomian.

Disamping itu kebijakan pembangunan pedesaan seharusnya dilaksanakan dengan pendekatan sektoral dan regional. Pendekatan sektoral adalah dalam perencanaan selalu dimulai dengan pernyataan yang menyangkut sektor apa yang diperlukan untuk dikembangkan dalam mencapai tujuan pembangunan. Sedangkan pendekatan regional itu lebih terfokus pada daerah mana yang perlu mendapatkan prioritas untuk dikembangkan, setelah itu baru ditetapkan sektor apa yang sesuai untuk dikembangkan dimasing-masing daerah.

Daerah Kampung Teluk Rimba sektor yang menopang ekonomi masyarakat kampungnya hanyalah sektor pertanian sawit dan karet. Jumlah Penduduk kampung Teluk Rimba adalah 684 jiwa dengan jumlah KK 183, dengan mayoritas mata pencaharian masyarakatnya adalah petani sawit dan karet. Dalam sarana sumber daya manusia masyarakat Kampung Teluk Rimba, berdasarkan hasil pengamatan dilapangan masih sangat rendah. Seharusnya program pembangunan yang dibuat tidak harus cenderung pada pembangunan fisik saja sehingga penekanan terhadap pembangunan masyarakat umum kurang tersentuh. Padahal berbagai persoalan yang

membutuhkan penangan pembangunan masyarakat kampung sesungguhnya sangat mendesak, seperti tidak terakomodasinya keinginan dan kebutuhan masyarakat dalam program-program pemerintah, dan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat masih rendah. Berikut tabel penjabaran mengenai tingkat pendidikan dan pekerjaan masyarakat kampung Teluk Rimba:

**Tabel I.4: Klasifikasi Penduduk Kampung Teluk Rimba Berdasarkan Tingkat Pekerjaan.**

No	Klasifikasi Penduduk Menurut Tingkat Pekerjaan	Jumlah
1	PNS	8
2	ABRI	-
3	POLRI	-
4	Swasta	62
5	Buruh	94
6	Petani	247
7	Nelayan	15
8	Tidak Bekerja	258
<b>Jumlah</b>		<b>684</b>

*Sumber: Kantor Desa Teluk Rimba*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dengan mayoritas pekerjaan masyarakat kampung Teluk Rimba sebagai petani maka pemberdayaan sumber daya masyarakat dan pengembangan sumberdaya kelembagaan kampung juga perlu untuk ditingkatkan.

Peran Pendamping Lokal Desa sangat dibutuhkan untuk keberhasilan pembangunan desa. Dari tabel 1.2 diatas juga menunjukkan bahwa kampung Teluk Rimba masih dikategorikan kampung berkembang, dimana kampung berkembang ini masih sangat dibutuhkan pembimbingan untuk menuju kampung maju melalui

pengembangan kapasitas kampung dengan melakukan pemberdayaan masyarakat Kampung yang menjadi tugas utama dari Pendamping Lokal Desa.

Selain itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung dan untuk meningkatkan pembangunan perekonomian masyarakat peran Pendamping Lokal Desa sangat dibutuhkan. Karena pada saat ini di kampung Teluk Rimba masyarakat yang dikategorikan kurang mampu masih dominan, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 1. 5 Klasifikasi Data Penduduk Kurang Mampu di Kampung Teluk Rimba Berdasarkan Bantuan Dana Sosial.**

No	Klasifikasi Bantuan Dana Sosial	Jumlah KK Penerima Bantuan
1	Sembako	28
2	BPNT	45
3	BLT KEMENSOS	16
4	PKH	28
<b>Jumlah</b>		<b>177</b>

*Sumber: Kampung Teluk Rimba, 2021*

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari 183 KK di kampung Teluk Rimba 177 KK adalah penerima Bantuan Dana Sosial yang dikategorikan sebagai keluarga kurang mampu. Dengan demikian, peran Pendamping Lokal Desa di Teluk Rimba sangat dibutuhkan untuk mempercepat kemajuan Kampung Teluk Rimba dengan cara mempercepat pembangunan desa agar kesejahteraan masyarakat kampung dapat terwujud.

Dengan adanya Pendamping Lokal Desa diharapkan dapat tercipta pembangunan yang partisipatif dari pemerintahan desa dan masyarakat. Maka dari itu, dalam upaya pembangunan desa Pendamping Lokal Desa harus melaksanakan tugasnya secara

maksimal. Karena Pendamping Lokal Desa merupakan penggerak mekanisme dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan desa. Begitu pula dengan Pendamping Lokal Desa yang ada di kampung Teluk Rimba Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak merupakan program yang diharapkan dapat membantu untuk kemajuan pembangunan Kampung Teluk Rimba.

Dalam hal ini pendampingan desa dilaksanakan agar pemerataan pembangunan di desa dapat tercapai dengan cepat. Dengan adanya fasilitasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sangat diperlukan untuk mendorong prioritas penggunaan dana desa. Dengan demikian dana desa dapat dialokasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Adapun nama-nama pendamping desa di Kampung Teluk Rimba adalah sebagai berikut:

**Tabel I.6 Nama-Nama Pendamping Desa Di Teluk Rimba Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jabatan.**

No	Nama	Tingkat Pendidikan	Jabatan
1.	Agus Siaturrahman, S.Kom.	Strata Satu (S1)	Pendamping Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa (ADK).
2.	Wawan Setiawan.	SMK	Pendamping Lokal Desa
3.	Yurnalis, ST.	Strata Satu (S1)	Pendamping Desa Teknik Infrastruktur
4.	Mawardi, S. Sos.	Strata Satu (S1)	Pendamping Pemberdayaan Desa
5.	Lesi Susanti, ST.	Strata Satu (S1)	Pendamping Pemberdayaan Desa

*Sumber: Kantor Desa Teluk Rimba, 2020.*

Berdasarkan kenyataan diatas dapat dirangkum bahwa fenomena yang terjadi pada kantor kampung Teluk Rimba kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak adalah:

1. Dalam menjalankan tugasnya Pendamping Lokal Desa di Teluk Rimba masih belum bisa menunjukkan perubahan yang signifikan. Hal ini terjadi karena di Kecamatan Koto Gasib Pendamping Lokal Desa hanya terdapat tiga orang, sedangkan jumlah Kampung di kecamatan Koto Gasib terdapat sebelas kampung dan masing-masing mengelola tiga sampai empat Kampung. hal inilah yang menyebabkan kinerja Pendamping Lokal Desa di Teluk Rimba kurang maksimal.
2. Dalam upaya Pembangunan Desa di Kampung Teluk Rimba dalam Bidang Infrastruktur sudah mulai tercapai walaupun belum sempurna, namun Pembangunan kampung dalam bidang ekonomi belumlah berdampak maksimal. Hal ini dapat diidentifikasi melalui belum adanya Program Pembangunan Ekonomi Desa yang dibuat oleh Pendamping Lokal Desa di kampung Teluk Rimba.

Berdasarkan dari fenomena-fenomena diatas inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Evaluasi Tugas Pendamping Desa dalam Upaya Pembangunan Desa di Kampung Teluk Rimba Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak”**.

## 1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah penelitian yang akan diajukan adalah “Bagaimanakah pelaksanaan tugas Pendamping Lokal Desa dalam upaya Pembangunan Desa di Teluk Rimba Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak?”.

## 1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengevaluasi tugas Pendamping Desa dalam upaya Pembangunan Desa di Teluk Rimba Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penghambat tugas Pendamping Desa dalam upaya Pembangunan Desa di Teluk Rimba Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.

### 1.3.2 Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu dasar dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan.
- b. Secara Akademis, hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu dasar untuk peneliti selanjutnya dalam membahas permasalahan yang sama.
- c. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu dasar pengembangan dan pembinaan tugas Pendamping Desa khususnya Desa Teluk Rimba dalam upaya meningkatkan Pembangunan Desa.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### 2.1 Studi Kepustakaan

##### 2.1.1 Konsep Pemerintahan

Syafiie (2016: 8) menjelaskan bahwa secara etimologi pemerintah dapat diartikan sebagai perintah berarti pekerjaan menyeluruh, dari hal ini terdapat dua unsur yang saling berhubungan yaitu unsur rakyat dan unsur pemerintah. Berawal dari awalan “Pe-“, menjadi “Pemerintah” yaitu badan atau organisasi yang mengatur dan mengurus. Setelah itu ditambah akhiran “-an” menjadi pemerintahan, yang berarti perbuatan, cara atau perihal. Soemendar menjelaskan (dalam Syafiie, 2016: 11), bahwa Pemerintahan itu suatu Badan penting dalam pemerintahannya. Maka dari itu pemerintah seharusnya juga memperhatikan ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan dari suara hati rakyat serta kepentingan yang dibutuhkan oleh masyarakat berdasarkan pengaturan dan pengaruh lingkungan, memiliki legitimasi dan komunikasi peran dari lapisan masyarakat.

Selanjutnya, menurut Strong (1960), Pemerintahan apabila dilihat dalam arti luas berarti memiliki kewenangan untuk memelihara keamanan negara. Kewenangan dalam hal ini harus memiliki tiga hal yaitu: kekuatan militer, kekuatan legislatif, dan kekuatan finansial. Ketiga hal tersebut sangat berperan dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara (dalam Syafiie, 2016: 10). Sedangkan kata Pemerintahan sudah ada dari zaman Rasulullah SAW. Sebagai mana yang terdapat dalam (QS. Al-Imran 3: 104) yang artinya bawhasannya (Pemerintahan adalah)

segolongan ummat yang mengajak kepada kebaikan, mengajak pada kebenaran, melarang berbuat mungkar, dan itulah orang-orang yang beruntung (dalam Syafiie, 2016: 12). Iver (1947) juga menambahkan bahwasannya Pemerintahan adalah organisasi yang berasal dari orang-orang yang memiliki kekuasaan yang membuat bagaimana manusia itu bisa diperintah (dalam Syafiie, 2011: 22). Wilson (1903) menjelaskan bahwa Pemerintahan merupakan suatu organisasi kekuatan dari sekelompok orang untuk mencapai tujuan mereka bersama dalam hal memberikan keterangan dalam urusan umum kemasyarakatan (dalam Syafiie, 2011: 23).

Sayre (1960) mendefinisikan bahwa pemerintahan itu merupakan organisasi sebuah negara yang menunjukkan dan menggerakkan kekuasaan (dalam syafiie, 2016: 10). Selain itu, Apter (1977) menambahkan bahwa definisi dari pemerintahan itu adalah kumpulan dari unit anggota umum yang memiliki kewajiban untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya (dalam Syafiie, 2016: 11). Ndaraha (2011: 6) menjelaskan bahwa pemerintah adalah organ yang memiliki kewenangan untuk memproses pelayanan publik dan memiliki kewajiban untuk memproses pelayanan civil bagi masyarakat melalui hubungan pemerinthan, sehingga dapat diterima oleh setiap masyarakat sesuai dengan tuntutan yang diperintah. Selanjutnya Munaf (2016: 47) menjelaskan bahwa pemerintahan dalam metode lama memiliki objek material negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam metode baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat. Sehingga pemerintahan diartikan sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan. Selain itu Dharma (2002: 32) juga

mendefinisikan bahwa pemerintahan itu merupakan sekelompok orang yang diberi sesuatu kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan atas interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pada keperluan hidupnya sehari-hari, sehingga interaksi tersebut dapat berjalan secara harmonis.

Dari keseluruhan definisi diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa pemerintahan adalah lembaga atau organisasi tertentu yang diberikan legitimasi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.

### **2.1.2 Konsep Ilmu Pemerintahan**

Menurut Syafiie (2011: 23) Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tata cara melaksanakan pengurusan berupa eksekutif, pengaturan berupa legislatif, dan kepemimpinan serta koordinasi pemerintahan dalam berbagai gejala pemerintahan secara baik dan benar. Rosenthal (1978) juga menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan itu merupakan ilmu yang mendalami pelajaran tentang penunjukan cara kerja struktur dan proses pemerintahan umum (dalam syafiie, 2011:21). Selanjutnya Poelje (1953) mendefinisikan bahwa ilmu pemerintahan itu berupa ilmu yang menjelaskan tata cara bagaimana penyusunan dinas umum dengan sebaik-baiknya (dalam syafiie, 2011: 21). Selain itu, Brasz (1975) juga menjelaskan bahwa maksud dari ilmu pemerintahan itu yaitu suatu ilmu yang mendalami tentang tata cara bagaimana penyusunan lembaga pemerintahan dan difungsikan terhadap masyarakatnya (dalam syafiie, 2011: 21). Iver (1960) juga menjelaskan bahwa ilmu

pemerintahan itu adalah suatu ilmu yang berisikan tentang tata cara bagaimana manusia dapat diperintah (dalam syafiie, 2016: 10).

Ndaraha (2002) menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang menjelaskan tata cara memenuhi kebutuhan dan melindungi tuntutan masyarakat terhadap layanan civil dan publik dalam lingkup pemerintahan (dalam syafiie, 2016:11). Kemudian Musanef (1985) juga menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mendalami unsur-unsur lembaga, berhubungan dengan keselarasan antara hubungan lembaga dengan masyarakat (dalam syafiie, 2016: 11). Menurut Gaffar ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari proses politik dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam sebuah negara (dalam Ndraha, 2010: 16). Selain itu Soewargono (dalam Ndraha, 2010: 32) juga mendefinisikan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang secara otonomi mempelajari system kerjanya struktur-struktur dan proses-proses pemerintahan umum, baik internal maupun eksternal. Syafhendry dan Susanti (22: 2018) menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana menyeimbangkan pelaksanaan kepengurusan eksekutif, pengaturan legislatif, kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar.

Dari keseluruhan definisi diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu pengetahuan yang mendalami prinsip dan tata cara penyusunan struktur dan proses pemerintahan umum dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan terhadap masyarakat.

### 2.1.3 Konsep Evaluasi

Menurut Wirawan (2011) evaluasi adalah sebagai riset untuk mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan informasi yang bermanfaat tentang objek evaluasi, mengevaluasikan dengan cara membandingkan indicator evaluasi yang untuk dijadikan pengambilan keputusan mengenai objek evaluasi (dalam Yuslaini dan Juliana, 2019: 8). Arikunto (2006) juga menjelaskan definisi dari evaluasi, yang mana menurut Arikunto evaluasi adalah suatu penilaian untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya dari informasi yang dikumpulkan tersebut dijadikan dasar untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan (dalam Yuslaini dan Juliana, 2019: 8).

Menurut Hadi (2011), evaluasi adalah sebagai proses mengumpulkan informasi tentang satu objek, menilai dan membandingkannya dengan standar, kriteria, dan indicator (dalam Mais, Liando, dan Pangemanan, 2019: 3). Husni (2010) juga menjelaskan bahwa evaluasi merupakan suatu proses untuk menyediakan informasi mengenai hasil penilaian atas permasalahan yang ditemukan (dalam Mais, Liando, dan Pangemanan, 2019: 3). Selain itu, wirawan (2012) juga menjelaskan (dalam Mais, Liando, dan Pangemanan, 2019: 3) bahwa evaluasi berdasarkan objeknya terbagi menjadi beberapa jenis yaitu:

1. Evaluasi kebijakan, adalah menilai suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan atau kebijakan yang telah dilaksanakan.
2. Evaluasi program, adalah kegiatan yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan yang dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas.

3. Evaluasi proyek, adalah adalah suatu kegiatan yang dilakukan pada waktu tertentu untuk mendukung pelaksanaan program.
4. Evaluasi material, adalah sejumlah material atau produk-produk tertentu untuk melaksanakan kebijakan, program, atau proyek yang sedang dijalankan.
5. Evaluasi Sumber Daya Manusia (Evaluasi Kinerja), adalah suatu evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui pengembangan sumber daya manusia yang dilaksanakan disebuah lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan dan lembaga swadaya masyarakat.

Menurut William N. Dunn (2000) istilah evaluasi memiliki arti yang berhubungan, masing-masing hubungan tersebut menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Istilah ini dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka, dan penilaian. Indikator evaluasi yang dikembangkan oleh William N. Dunn ini mencakup enam indikator yaitu:

1. Efektifitas, yaitu suatu kriteria penilaian yang berkenaan dengan pencapaian keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Efisiensi, yaitu suatu kriteria penilaian yang berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.
3. Kecukupan, yaitu suatu kriteria penilaian yang berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah

4. Pemerataan, yaitu subjek penilaian yang ditujukan untuk melihat manfaat dan biaya kegiatan yang terdistribusi secara proporsional untuk aktor-aktor yang terlibat.
5. Responsivitas, yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu subjek penilaian dapat memuaskan suatu kebutuhan atau referensi tertentu.
6. Ketepatan, yaitu kriteria yang digunakan untuk penilaian apakah hasil dari subjek merupakan tujuan pilihan yang layak. (dalam Sari dan Marom, 2019: 7).

Selain itu Dunn (2003) juga menjelaskan bahwa evaluasi berhubungan dengan produksi informasi mengenai manfaat dari hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan tujuan yang telah dicapai (dalam Monalisa, 2015: 4). Nugroho (2003:184) juga mengatakan tujuan dari evaluasi ini adalah untuk melibatkan seberapa besar kesenjangan antara pencapaian tujuan dan harapan yang akan dicapai. Jadi evaluasi itu bertujuan untuk mencari kekurangan dan menutup kekurangan, namun bukanlah untuk menyalah-nyalahkan.

Menurut Ndraha (2011: 201) evaluasi adalah menganalisis hasil dengan proses perbandingan antara standar dengan fakta. Ndraha (2011: 202) juga menjelaskan bahwa ada tiga model evaluasi yaitu:

1. Model Before-After, yaitu perbandingan antara sebelum dengan sesudah suatu tindakan. Tolak ukur yang digunakan dalam model ini adalah before.

2. Model Das Solen-Das Sein, yaitu perbandingan apa yang seharusnya dengan yang nyatanya. Tolak ukur yang digunakan dalam model ini adalah Das Solen.
3. Model Kelompok Kontrol-Kelompok Tes, yaitu perbandingan dengan cara memberi perlakuan dengan menggunakan tolak ukur kelompok control.

Menurut Sudharsono (dalam Mais, Liando, dan Pangemanan, 2019: 3) keberhasilan dari evaluasi terdapat dua konsep didalamnya yaitu efektifitas dan efisiensi. Efektifitas merupakan perbandingan antara output dan inputnya sedangkan efisiensi adalah taraf pendayagunaan input untuk menghasilkan output melalui suatu proses. Wirawan (2008) mengatakan bahwa menurut Anderson evaluasi dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penialian yang substansi, implementasi dan dampak dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu Winarno (2008) juga menjelaskan bahwa menurut Lester dan Stewart bahwa evaluasi dapat dibedakan kedalam dua tugas yaitu untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya, dan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standard an kriteria yang telah ditetapkan (dalam Mais, Liando, dan Pangemanan, 2019: 4).

Berdasarkan pandangan-pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah suatu penafsiran atau pemberian penialaian yang valid dan terpercaya terhadap suatu objek penilaian yang dapat menunjuk pada aplikasi skala nilai hasil kerja.

#### 2.1.4 Konsep Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah

Menurut Nurcholis (2007: 1) pemerintahan daerah berasal dari Eropa pada abad 11 dan 12. Pada masa ini muncul satuan-satuan daerah pada tingkat dasar yang secara alamiah membentuk suatu lembaga pemerintahan. Stoker (1991) menjelaskan bahwa munculnya pemerintahan daerah modern berkaitan erat dengan fenomena industrialisasi. Industrialisasi menyebabkan perpindahan penduduk dari desa ke kota secara besar-besaran, hal tersebut mengakibatkan berubahnya corak wilayah (dalam Nurcholis, 2007: 2).

Nurcholis (2007: 3) menyatakan bahwa dalam otonomi daerah terbagi menjadi tiga urusan yaitu sentralisasi, dekonsentrasi, dan desentralisasi yang mana ketiga urusan ini merupakan konsep yang berhubungan dengan pengambilan keputusan dalam organisasi negara. Menurut Faltas (dalam Nurcholis, 2007: 3) ada dua kategori dalam pengambilan keputusan, yaitu: keputusan politik dan keputusan administratif. Berkenaan dengan hal tersebut keputusan politik sering juga disebut dengan keputusan alokasi sedangkan keputusan administratif sering pula disebut dengan keputusan pelaksanaan.

Selanjutnya Nurcholis (2007: 6) menjelaskan bahwa konteks negara Indonesia sebagai negara kesatuan maka kedaulatan negara adalah tunggal. Karena dasarnya sistem pemerintahan negara kesatuan adalah sentralisasi maka sesuai dengan pasal 18, 18A, dan 18B UUD 1945 penyelenggaraan pemerintahannya tidak diselenggarakan secara sentralisasi akan tetapi desentralisasi. Dalam pasal-pasal tersebut ditegaskan bahwa pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah

daerah yang diatur dengan undang-undang. Selain itu Nurcholis (2007: 7) juga mengatakan bahwa pembentukan organisasi pemerintah daerah tidak sama dengan pembentukan negara bagian dalam negara federal. Kedudukan pemerintah daerah dalam negara kesatuan adalah subdivisi pemerintahan nasional, yang mana pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan pemerintahan akan tetapi kewenangan pemerintah daerah dapat timbul setelah memperoleh penyerahan dari pusat. Adanya pemerintahan daerah dimulai dari kebijakan desentralisasi.

Maddick (1963) menjelaskan bahwa desentralisasi adalah penyerahan kewenangan secara hukum untuk menangani bidang dan fungsi-fungsi tertentu kepada daerah otonom (dalam Nurcholis, 2007: 10). Selain itu Rondinelli, Nellis, dan Chema (1963) mendefinisikan desentralisasi merupakan penciptaan dan penguatan baik itu keuangan maupun hukum pada unit-unit pemerintahan substansial (dalam Nurcholis, 2007:11). Selanjutnya Widada (2007: 1) mengatakan bahwa pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pemerintah daerah memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah lainnya yang meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan lain sebagainya.

Berdasarkan padangan-pandangan diatas penulis menyimpulkan bahwa pemerintahan daerah dan otonomi daerah adalah daerah otonom yang diberikan kekuasaan dan kewenangan dari pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam hal mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum.

### 2.1.5 Konsep Pemerintahan Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 juga menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara tersurat Peraturan pemerintahan ini mengakui adanya otonomi desa, yang mana Peraturan Pemerintah ini juga memberikan kewenangan yang cukup besar bagi kepala desa dalam melaksanakan tugas sebagai kepala pemerintahan desa. Kewenangan-kewenangan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
2. Mengajukan rancangan peraturan desa
3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa.

4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
5. Membina kehidupan masyarakat desa.
6. Membina perekonomian desa
7. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
8. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. menurut Rauf dan Maulidiah (2015) perlu dipahami beberapa hal terkait tentang desa, yaitu: pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pemerintahan merupakan penyelenggaraan kepentingan masyarakat setempat, pemerintahan desa berada dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (dalam Yuslaini dan Juliana, 2019: 9).

Berdasarkan pandangan-pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa untuk mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### 2.1.6 Konsep Pembangunan Desa

Adisasmita (2006) mengatakan bahwa pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam upaya peningkatan sumber daya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan pada potensi dan kemampuan desa (dalam Christina, 2017: 28). Menurut Christina (2017:29) pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam konteks pembangunan nasional. Pembangunan masyarakat desa dapat dilakukan melalui pengembangan kemampuan sumber daya manusia yang ada di pedesaan sehingga kreativitas dan aktivitasnya dapat semakin berkembang serta kesadaran lingkungannya semakin tinggi.

Selain itu Christina (2017: 29) juga mendefinisikan bahwa pembangunan desa merupakan suatu konsep pembangunan yang berbasis pedesaan dengan tetap memperhatikan ciri khas sosial masyarakat yang tinggal di kawasan pedesaan. Dengan harapan pembangunan desa dapat menjadi solusi bagi perubahan sosial masyarakat desa dan menjadikan masyarakat desa sebagai basis perubahan. Adisasmita (2013) menjelaskan tujuan dari pembangunan desa dibagi menjadi dua, yaitu: pembangunan desa jangka panjang dan pembangunan desa jangka pendek. Tujuan pembangunan desa jangka panjang adalah untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang secara langsung dilakukan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pada pendekatan bina lingkungan, bina usaha, dan bina manusia secara tidak langsung meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional. Sedangkan tujuan pembangunan

jangka pendek adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dan dalam pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam (dalam Christina, 2017: 30).

Adisasmita (2006) mengatakan (dalam Christina, 2017:30) bahwa pembangunan desa dapat dirumuskan sebagai terciptanya kawasan pedesaan yang mandiri berwawasan lingkungan, selaras, serasi, dan bersinergi dengan kawasan-kawasan pedesaan lain melalui pembangunan komprehensif dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera. Menurut Christina (2017: 30) pembangunan desa adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan melalui pencapaian kemajuan sosial dan ekonomi secara berkesinambungan dengan tujuan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan yang dilaksanakan dalam rangka intervensi untuk mengurangi tingkat kesenjangan kemajuan antar wilayah pedesaan dan perkotaan sebagai akibat dari pembangunan nasional.

Christina (2017: 31) juga mengatakan bahwa pembangunan masyarakat desa merupakan bagian dari pembangunan masyarakat yang diarahkan kepada pembangunan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan pada satuan wilayah pedesaan. Selain itu, adapun strategi pembangunan desa menurut Adisasmita (2013) terdapat empat jenis yaitu: strategi pertumbuhan, strategi kesejahteraan, strategi tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, dan strategi terpadu menyeluruh (dalam Christina, 2017: 32).

Berdasarkan pandangan-pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa merupakan peranan dari pembangunan nasional yang dimulai dari daerah pinggiran guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Skala prioritas pembangunan desa tidak hanya terfokus pada pembangunan sarana dan prasarana infrastuktur melainkan juga terfokus terhadap pemberdayaan masyarakatnya agar terwujudnya kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, dan sejahtera.

### **2.1.7 Konsep Pendamping Desa**

Yuslaini dan Juliana (2019: 9) menyatakan bahwa pendamping desa bukanlah pengelola proyek pembangunan di desa. Fokus dari kerja pendamping desa itu ialah pada upaya memberdayakan masyarakat desa melalui proses belajar sosial. Dalam pasal 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa, menjelaskan bahwa pendamping desa bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Selanjutnya dalam pasal 12 dijelaskan bahwa pendamping desa memiliki tugas sebagai berikut:

1. Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial budaya dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

3. Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
4. Melakukan pengorganisasian didalam kelompok-kelompok masyarakat desa.
5. Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru.
6. Mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif.
7. Melakukan koordinasi pendampingan ditingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Christina (2017: 27) menjelaskan bahwa pendampingan terhadap desa pada prinsipnya merupakan upaya untuk menggerakkan potensi yang ada di desa sehingga desa mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk perubahan-perubahan kearah yang lebih baik. Selanjutnya Christina (2017: 24) juga mengatakan bahwa pendamping desa dituntut untuk mampu melakukan transformasi sosial dengan mengubah secara mendasar pendekatan control dan mobilisasi pemerintah terhadap desa menjadi pendekatan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian desa didorong menjadi subjek penggerak pembangunan negara Indonesia dari pinggiran sehingga mampu merealisasikan salah satu agenda strategi prioritas pemerintah.

Cristina (2017: 3) mengatakan bahwa pendamping desa bertujuan untuk mempercepat pembangunan desa agar kesejahteraan masyarakatdesa dapat terwujud.

Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif juga perlu dibina agar kemajuan masyarakat dapat tercapai. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah tuntutan terhadap para pendamping desa untuk mampu melakukan transformasi sosial dengan mengubah pendekatan secara control dan mobilisasi pemerintah terhadap desa dan pemerintahan desa yang merupakan satu kesatuan diberdayakan untuk mampu hadir sebagai komunitas yang mandiri. Dengan demikian desa didorong untuk menjadi subyek penggerak pembangunan Indonesia dari pinggiran, sehingga mampu merealisasikan salah satu agenda strategis prioritas pemerintahan (dalam Cristina, 2017: 24).

Menurut Cristina (2017: 25), pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan dengan pendamping desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Pemerintah dan pemerintahan daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat desa dengan pendamping desa secara berjenjang dan sesuai dengan kebutuhan. Pendamping desa secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa atau pihak ketiga.

Berdasarkan padangan-pandangan diatas dapat simpulkan bahwa pendamping desa adalah penggerak potensi yang ada di desa dengan fokus kerja pemberdayaan masyarakat agar mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk perubahan-perubahan kearah yang lebih baik. Perubahan-perubahan ini dapat dilihat dari sisi ekonomi, politik, sosial, maupun budaya.

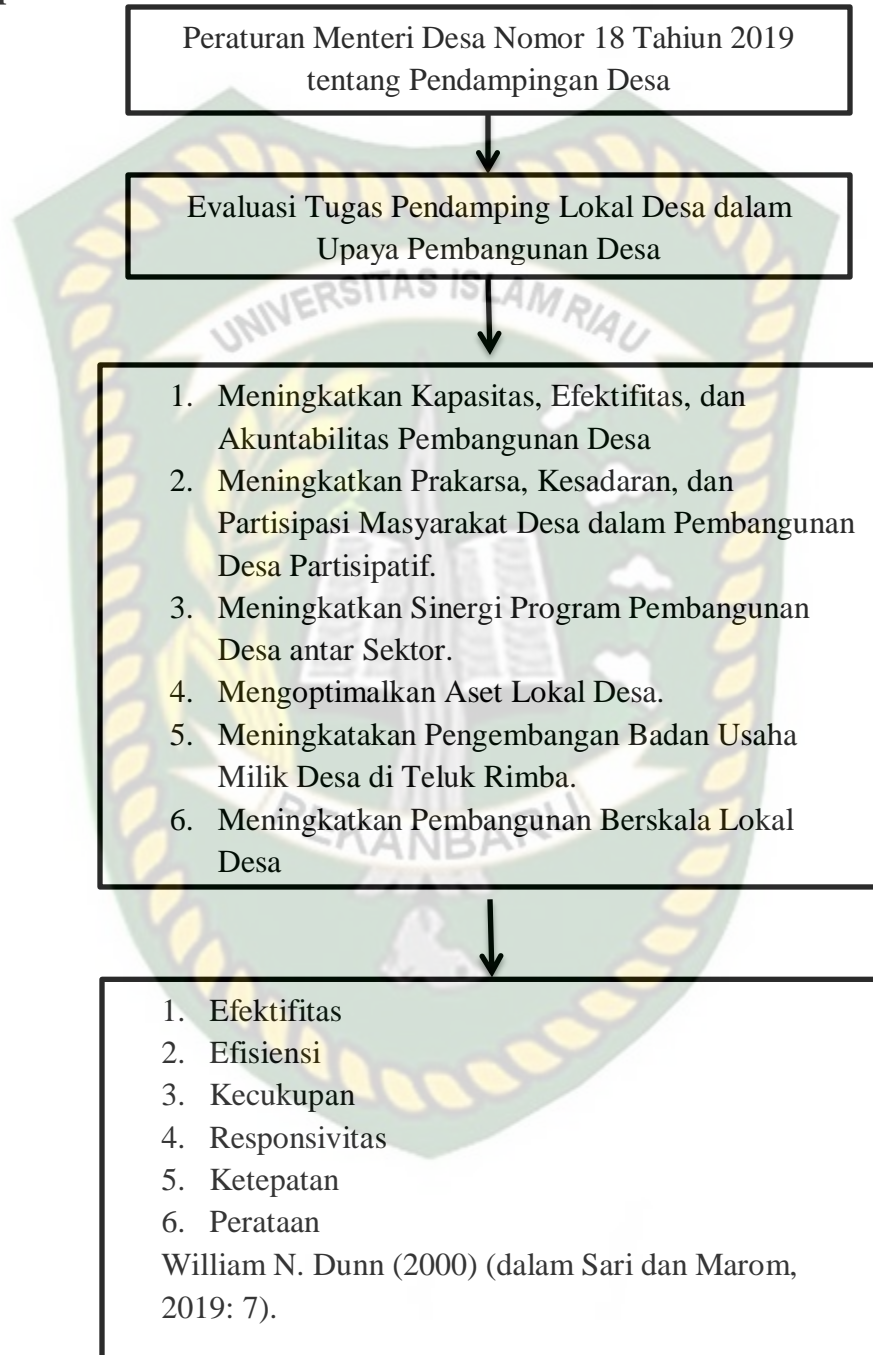
## 2.2 Kerangka pikir

Adapun kerangka pikiran untuk menjelaskan antara variabel dan indikator dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori evaluasi menurut William N. Dunn (2000). Menurut William N. Dunn (2000) (dalam Sari dan Marom, 2019: 7) istilah evaluasi memiliki arti yang berhubungan, masing-masing hubungan tersebut menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Istilah ini dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka, dan penilaian. Indikator evaluasi yang dikembangkan oleh William N. Dunn ini mencakup enam indikator yaitu:

1. Efektifitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Responsivitas
5. Ketepatan
6. Perataan

Untuk lebih jelasnya, gambaran hubungan antara variable penelitian dan teori-teori yang dijadikan indikator akan ditampilkan pada gambar dibawah ini:

**Gambar II.1: Kerangka pikir tentang evaluasi tugas pendamping desa dalam upaya pembangunan desa di Kampung Teluk Rimba Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.**



*Sumber: Modifikasi Peneliti, 2020*

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat menambah wawasan teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian ini. Namun peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam menambah wawasan bahan kajian pada penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal dan skripsi terdahulu yang terkait dengan penelitian ini.

**Table II.1 Kajian Penelitian Terdahulu yang penelitiannya menyangkut tentang tugas Pendamping Desa.**

<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Perbedaan</b>
Nina Yuslaini dan Septa Juliana	Evaluasi Program Pendamping Desa di Kabupaten Bengkalis	Pelaksanaan program pendamping desa di Kabupaten Bengkalis belum berjalan sebagaimana mestinya, karena keberadaan pendamping desa di Kabupaten Bengkalis masih memberikan dampak yan belum signifikan terhadap peningkatan kemampuan aparaturnya desa baik dalam aspek kapasitas maupun efektivitas.	Penelitian ini terfokus pada evaluasi program pendamping desa dan bertujuan untuk melihat program pendamping desa.
Maria Christina	Kinerja Pendamping Lokal	Hasil dari penelitian	Penelitian ini terfokus pada

	Desa dalam Peningkatan Pembangunan Desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah	menunjukkan kinerja pendampingan yang dilakukan oleh pendamping lokal desa belum maksimal. Pada indikator prestasi kerja pendamping lokal desa belum memperlihatkan hasil yang positif, karena pelaksanaan pendampingan belum dilaksanakan dengan baik.	kinerja dari pendampingan lokal desa dalam peningkatan pembangunan desa dengan tujuan untuk mengetahui kinerja pendamping lokal desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, serta untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi kinerja pendamping lokal desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.
Deni Triyanto	Analisis Kinerja Pendamping Desa dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kinerja pendamping desa belum maksimal, dapat dilihat dari kerja sama yang dibangun oleh pendamping desa Taba Jambu belum optimal, kerja sama yang baru dilakukan yaitu baru sebatas kerja sama dengan	Penelitian ini terfokus pada kinerja dari pendamping desa dalam membangun kemandirian desa, dengan tujuan untuk mendeskripsikan kinerja pendamping desa dalam membangun kemandirian desa

		masyarakat desa untuk meningkatkan ekonomi desa, karena terkendala mengenai rumitnya regulasi dari pemerintah, manajerial desa yang lemah dan belum tersedianya kader-kader berkualitas di desa Taba Jambu.	di Desa Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah.
--	--	---	---

*Sumber: Modifikasi Penelitian, 2020.*

#### 2.4 Konsep Operasional

Untuk mempermudah penelitian, maka penulis merasa perlu untuk mengoperasionalkan konsep-konsep tersebut sebagai berikut:

1. Evaluasi adalah suatu penafsiran atau pemberian penilaian yang valid dan terpercaya terhadap suatu objek penilaian yang dapat menunjuk pada aplikasi skala nilai hasil kerja.
2. Pendamping desa adalah penggerak potensi yang ada di desa dengan fokus kerja pada pemberdayaan masyarakat agar mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk perubahan-perubahan kearah yang lebih baik.
3. Pembangunan desa merupakan peranan dari pembangunan nasional yang dimulai dari daerah pinggiran guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Skala prioritas pembangunan desa tidak hanya terfokus pada pembangunan sarana dan prasarana infrastuktur melainkan juga terfokus terhadap

pemberdayaan masyarakatnya agar terwujudnya kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, dan sejahtera.

4. Efektifitas adalah suatu kriteria penilaian yang berkenaan dengan pencapaian keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
5. Efisiensi adalah suatu kriteria penilaian yang berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.
6. Kecukupan adalah suatu kriteria penilaian yang berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah
7. Perataan adalah subjek penilaian yang ditujukan untuk melihat manfaat dan biaya kegiatan yang terdistribusi secara proporsional untuk aktor-aktor yang terlibat.
8. Responsivitas adalah berkenaan dengan seberapa jauh suatu subjek penilaian dapat memuaskan suatu kebutuhan atau referensi tertentu.
9. Ketepatan adalah kriteria yang digunakan untuk penilaian apakah hasil dari subjek merupakan tujuan pilihan yang layak.

## 2.5 Operasional Variabel

Operasional variabel dalam penelitian ini penulis sajikan dalam bentuk tabel, uraian konsep, indikator, dan sub indikator dirancang untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat. Maka penulis tampilkan operasional variabel yang merupakan realita dari konsep operasional penelitian dan juga untuk mempermudah

menampilkan hasil penelitian serta pembahasan dalam sebuah konsep yang telah diukur, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel II.2. Operasional variabel penelitian Evaluasi tugas Pendamping Lokal Desa dalam upaya Pembangunan Ekonomi Desa di Teluk Rimba Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.**

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Menurut William N. Dunn (200) istilah evaluasi memiliki arti yang berhubungan, masing-masing hubungan tersebut menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Istilah ini dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka, dan penilaian (dalam Sari dan Marom, 2019: 7).	Evaluasi Tugas Pendamping Lokal Desa	1. Efektivitas	Meningkatkan Kapasitas, Efektifitas, dan Akuntabilitas Pembangunan Desa.
		2. Efisiensi	Meningkatkan Prakarsa, Kesadaran, dan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan Desa yang Partisipatif
		3. Kecukupan	Meningkatkan Sinergi Program Pembangunan Desa Antar Sektor
		4. Responsivitas	Mengoptimalkan Aset Lokal Desa Secara Emansipatoris
		5. Ketepatan	Meningkatkan pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Teluk Rimba
		6. Perataan	Meningkatkan Pembangunan berskala lokal desa

*Sumber: Modifikasi penelitian, 2020*

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana pendekatan ini peneliti akan menggunakan kondisi objektif yang ditemui dilapangan berdasarkan pada data-data yang berkaitan dengan tugas Pendamping Desa dalam upaya Pembangunan Desa di Teluk Rimba Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.

Sugiyono (dalam, 2018: 1) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian pada obyek yang alamiah dimana peneliti merupakan instrument kunci dengan teknik induktif. Hasil dari penelitian kualitatif ini lebih menekankan makna daripada abstraksi. Selain itu, Creswell (dalam, 2014: 15), juga mendefinisikan bahwa Penelitian kualitatif adalah suatu proses yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan dan menyajikan gambaran yang menyeluruh dan kompleks, melaporkan pandangan dengan rinci dari sumber informan, serta dilakukan dengan cara alamiah tanpa adanya interperensi apapun dari penulis.

### **3.2.Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian ini peneliti menetapkan pada Instansi Pemerintahan, yakni di Kantor Kampung Teluk Rimba Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak sebagai lokasi penelitian dikarenakan Kantor ini merupakan Perangkat kampung yang melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka melaksanakan tugas pembantuan, dengan alasan Pembangunan kampung di Teluk Rimba dalam realisasinya belum merata dan belum tepat sasaran.

### **3.3.Key Informan dan Informan**

Key Informan adalah orang yang tidak hanya memberikan informasi kepada Peneliti namun ia juga dapat memberikan suatu saran tentang sumber bukti yang mendukung. Sedangkan Informan adalah orang yang terdapat dalam latar penelitian, fungsinya yaitu sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi yang akan diteliti (dalam Basrowi dan Suwandi, 2008: 86). Adapun yang menjadi key informan dan informan dalam penelitian ini akan penulis jabarkan dalam tabel dibawah:

**Tabel III. 1: Tabel Key Informan dan Informan Penelitian di Kantor Desa Teluk Rimba Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.**

No	Jabatan	Jumlah (Orang)	Keterangan
1	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten/Kota	1	Key Informan
2	Penghulu	1	Informan
3	Kerani	1	Informan
5	Badan Permusyawaratan Kampung	1	Informan
7	Pendamping Lokal Desa	1	Informan
8	Masyarakat Kampung	5	Informan

*Sumber: Modifikasi Penulis, 2020.*

#### **3.4. Teknik Penentuan Key Informan dan Informan**

Dalam Penentuan Key Informan dan Informan, Peneliti menggunakan metode purposive sampling, yang mana metode ini merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan berbagai pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang dimaksud yaitu seperti orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan sehingga akan memudahkan peneliti dalam menjelajahi objek dan kondisi sosial yang akan diteliti (dalam Sugiyono, 2012: 54).

Untuk mencari jawaban atas permasalahan dalam penelitian, penulis menggunakan informan sebagai sumber data yang dilihat melalui perilaku, persepsi, tindakan dan motivasi dengan cara deskripsi dalam kata-kata dan bahasa dalam wawancara.

### 3.5. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber dilapangan, melalui wawancara terstruktur dan terbuka dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan langsung dengan evaluasi tugas Pendamping Desa dalam upaya Pembangunan Desa di Teluk Rimba Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.
2. Data sekunder adalah alat pendukung dari pelaksanaan evaluasi tugas Pendamping Desa dalam upaya Pembangunan Desa yang diperoleh dari sumber dan dokumen yang ada di Kantor Desa Teluk Rimba Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak berupa dokumen peraturan atau keputusan, pedoman umum, dan data Pembangunan dalam tahun 2020.

### 3.6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi (pengamatan) yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung kelokasi penelitian untuk mengamati segala aktivitas dan perilaku yang akan diteliti secara sistematis, baik itu struktur maupun tidak struktur. Untuk melakukan observasi dapat menggunakan strategi no-intervensi. Dalam penelitian kualitatif untuk melakukan observasi terdapat 3 yangkah yaitu: seleksi setting, yaitu terlebih dahulu mengenal kondisi secara umum dan menentukan tipe perilaku mana yang akan digali melalui informan.

Memfokuskan pengamatan, yaitu memfokuskan perhatian pada waktu, tempat, dan objek penelitian. Seleksi pengamatan, yaitu menyeleksi karakteristik serta hubungan antar elemen yang sebelumnya telah dipilih sebagai objek penelitian ( Bugin, 2011: 138).

2. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh keterangan dari informan dengan cara tanya jawab baik secara langsung maupun tidak langsung. Wawancara terdiri dari: Wawancara terstruktur yaitu wawancara dengan cara menerapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan tersusun untuk mencari jawaban hipotesis. Wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang pertanyaannya tidak disusun terlebih dahulu yang tergantung pada kondisi subjek (Bugin, 2011:156).
3. Dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pencatatan dan pendokumentasian. Dokumentasi yaitu rekaman peristiwa dengan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa yang menyangkut percakapan, menyangkut persoalan pribadi untuk memahami suatu objek berdasarkan pada gambaran situasi social pada waktu tertentu (Bugin, 2011: 142).

### 3.7. Teknik Analisis Data

Setelah data berhasil dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data diatas, maka peneliti akan mengelompokkan sesuai dengan jenis data. Kemudian data tersebut akan diolah dan dianalisis secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan memaparkan data yang berdasarkan kenyataan dilapangan dengan mengevaluasi tugas pendamping desa dalam pembangunan desa di Teluk Rimba Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.

### 3.8. Jadwal Penelitian

Waktu jadwal penelitian ini dilakukan pada akhir bulan agustus 2020. Maka dari itu penulis akan menjabarkan jadwal kegiatan penelitian ini pada tabel dibawah ini:

**Tabel III.2: Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian tentang Evaluasi Tugas Pendamping Desa dalam Upaya Pembangunan Desa di Teluk Rimba Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.**

No	Jenis kegiatan	Tahun 2020-2021																			
		Sep				Okt				Nov				Des				Jan			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan UP			X	X	X	X														
2	Seminar UP						X														
3	Riset							X													
4	Penelitian Lapangan								X												
5	Pengelolaan dan Analisa Data									X	X										
6	Konsultasi dan Bimbingan Skripsi											X	X	X	X						
7	Ujian Skripsi															X					
8	Revisi dan Pengesahan Skripsi																	X	X	X	
9	Penyerahan Skripsi																				X

### 3.9.Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Rencana sistematika laporan penelitian yang dilakukan pada penelitian diatas adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini sebagai pendahuluan yang akan menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

#### **BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR**

Dalam bab ini, akan diuraikan teori-teori dari berbagai literatur yang berkaitan dengan judul usulan penelitian. Dalam bab ini juga terdiri kerangka pikir, rumusan hipotesis, konsep operasional, operasional variabel, dan teknik pengukuran.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini adalah menjelaskan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal kegiatan penelitian, dan rencana sistematika laporan penelitian.

#### **BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang keadaan geografis, pemerintah dan penduduk didaerah lokasi penelitian.

#### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang penjelasan dari informan, dan hasil penelitian tentang evaluasi tugas pendamping desa dalam upaya

pembangunan desa di Teluk Rimba Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.

## **BAB VI : PENUTUP**

Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan dan saran.



## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Gambaran Umum Kecamatan Koto Gasib

##### 4.1.1 Geografis

Kecamatan Koto Gasib merupakan salah satu kecamatan yang termasuk di wilayah Kabupaten Siak. Wilayah Kecamatan Koto Gasib ini terletak diantara 0,32-0,51 Lintang Utara, dan 101,28-101,52 Bujur Timur. Kecamatan Koto Gasib berbatasan dengan:

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sungai Mandau dan Kecamatan Siak.
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Lubuk Dalam.
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tualang.
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Dayun dan Kecamatan Mempura.

Wilayah Kecamatan Koto Gasib terdiri dari dataran rendah dan berbukit-bukit dengan struktur tanah merah kuning dari batuan serta tanah organosol dalam bentuk rawa atau tanah basah. Kecamatan Koto Gasib secara umum berada pada daerah dataran dengan mayoritas sektor pertanian yang didominasi oleh perkebunan kelapa sawit dan karet. Selain itu Kecamatan Koto Gasib juga terdapat pelabuhan ekspor import yang dapat menggerakkan perekonomian masyarakat sekitarnya.

#### 4.1.2 Pemerintahan

Kecamatan Koto Gasib merupakan pemekaran dari kecamatan Tualang, dengan tujuan pemekaran ini yaitu untuk mempermudah masyarakat dan juga pemerintah dalam menjalankan hubungan administrasi, serta mempermudah jangkauan pembangunan dari pemerintah kecamatan. Kecamatan Koto Gasib terbentuk sebagai institusi eksekutif yang berperan dalam menjalankan roda pemerintahan dan pemberdayaan serta pembangunan masyarakat merupakan perpanjangan tangan dari otonomi pemerintahan Kabupaten Siak, dan merupakan aspirasi dari masyarakat untuk mempermudah penduduk dalam hal pelaksanaan kepengurusan administrasi serta lebih mendekatkan jarak antara pemerintah dengan penduduk yang di perintahnya.

Posisi pusat pemerintahan Kantor Kecamatan Koto Gasib ada di desa Pangkalan Pisang dengan jarak kurang lebih 40 Km dari pusat pemerintahan Kabupaten Siak. Berikut ini adalah tabel dari klasifikasi Perangkat Pemerintahan Kecamatan Koto Gasib berdasarkan Pangkat dan Jabatan:

**Tabel IV.1 Klasifikasi Perangkat Pemerintahan Kecamatan Koto Gasib berdasarkan Pangkat dan Jabatan**

No	Nama	Pangkat	Jabatan
1	Dicky Sofyan, S. STP.	Pembina (IV/a)	Camat
2	Tengku Mukhtasar, S. Sos., M. Si.	Pembina (IV/a)	SEKCAM
3	Drs. Wardan Adam Khatib, M.Si.	Pembina (IV/a)	Kasi PEM
4	Salami	Penata Tk I (III/d)	Kasi PMK
5	Muharam, S.Sos.	Penata Tk I (III/d)	Kasi Trantib
6	Mekawati, Amd.	Penata Muda Tk I (III/b)	Kasi Kessos
7	Rulestra Indra, ST.	Penata (III/c)	K. Perencanaan & Umum
8	M. Asmara Syarif, S.Sos.	Penata (III/c)	K. Keuangan & Kepegawaian
9	Rina Setiowati, SE.	Penata Muda (III/a)	Staf
10	Yenti, SH.	Penata Muda (III/a)	Staf
11	Nopriyani	Pengatur (II/c)	Staf
12	Leni Marlina	Pengatur (II/c)	Staf
13	Ria Kurniasih	Pengatur (II/c)	Staf
14	Susi Riani	Pengatur (II/c)	Staf
15	Supardi	Pengatur (II/c)	Staf
16	Firdaus. RW	Pengatur Muda Tk I (II/b)	Staf
17	Karmudi	Pengatur Muda (II/a)	Staf
18	Muhammad Faizal	Honorar	Staf
19	Sandi Wiardi	Honorar	Staf
20	Yudhi Atmaja Mandiri, S. IP.	Honorar	Staf
21	Murni Handayani	Honorar	Staf
22	Junaidi	Honorar	Staf
23	Agus Siaturrahman, S.Kom.	Honorar	Staf
24	Alfrinando. S. S, SP.	Honorar	Staf
25	Sri Wahyuni Utama, SE.	Honorar	Staf

*Sumber: Kantor Kecamatan Koto Gasib, 2021*

Dibawah naungan pemerintahan Kecamatan Koto Gasib ini terdapat beberapa kampung yang dikategorikan kedalam dua golongan menurut tingkat perkembangannya. Golongan pertama adalah kampung Swasembada, yaitu yang mana kampung ini dikategorikan sebagai kampung maju, dimana masyarakat di kampung ini sudah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensi sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Sedangkan yang kedua adalah kampung Swakarya, yaitu kampung ini dikategorikan sebagai kampung yang masih berkembang, kampung Swakarya merupakan sebuah kampung yang letaknya jauh dari pusat perekonomian, namun masyarakat kampung ini sudah mulai mampu meningkatkan taraf kehidupannya dengan hasil kerjanya sendiri. Maka dari itu berikut adalah penjabaran jumlah kampung di Kecamatan Koto Gasib berdasarkan status perkembangannya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel IV.2 Nama-Nama Kampung di Kecamatan Koto Gasib Berdasarkan Status Perkembangannya.**

No	Nama Kampung	Status Perkembangan
1	Empang Pandan	Swasembada
2	Keranji Guguh	Swasembada
3	Buatan I	Swakarya
4	Buatan II	Swakarya
5	Kuala Gasib	Swakarya
6	Pangkalan Pisang	Swakarya
7	Rantau Panjang	Swakarya
8	Sengkemang	Swakarya
9	Sri Gemilang	Swakarya
10	Tasik Seminai	Swakarya
11	Teluk Rimba	Swakarya

*Sumber: Kantor Kecamatan Koto Gasib, 2021*

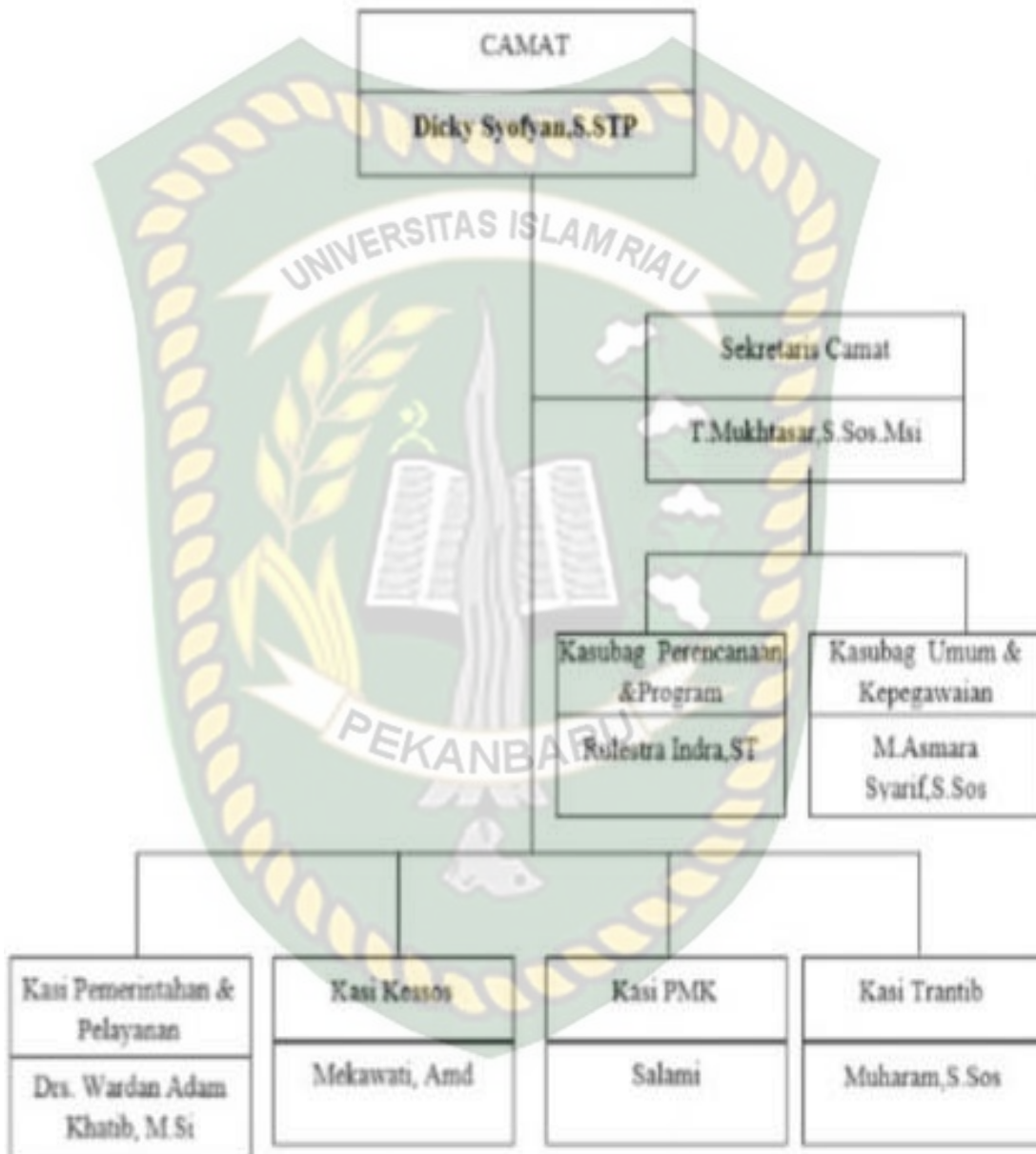
#### 4.1.3 Visi dan Misi Kecamatan Koto Gasib

Visi dari Kecamatan Koto Gasib adalah “Terwujudnya masyarakat Kecamatan Koto Gasib yang sejahtera melalui pemerintahan yang baik dan mengoptimalkan seluruh sumber daya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat”. Adapun misi dari Kantor Kecamatan Koto Gasib adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur melalui peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan sumber daya aparatur.
2. Mewujudkan pelayanan yang prima, bersih, dan berwibawa serta reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah di kecamatan serta penningkatan wawasan kebangsaan.

#### 4.1.4 Struktur Kantor Kecamatan Koto Gasib

Gambar IV. 3 Struktur Kantor Camat Koto Gasib Kabupaten Siak.



Sumber: [paten.siakkab.go.id](http://paten.siakkab.go.id)

#### 4.1.5 Kependudukan

Penduduk di wilayah Kecamatan Koto Gasib setiap tahun selalu bertambah, meskipun pertambahan dari jumlah penduduk itu tidaklah signifikan. Dari 11 desa yang terdapat di Kecamatan Koto Gasib ini terdapat 5.483 KK dengan jumlah penduduk 21.091 Jiwa. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk yang terdapat di Kecamatan Koto Gasib berdasarkan Desa dan jenis kelamin:

**Tabel VI.3 Klasifikasi Jumlah Penduduk di Kecamatan Koto Gasib Berdasarkan Kampung dan Jenis Kelamin.**

No	Nama Kampung	Jumlah KK	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Pangkalan Pisang	1.159	2.489	2.333	4.822
2	Kuala Gasib	501	1.084	981	2.065
3	Teluk Rimba	173	340	342	682
4	Buatan I	343	686	690	1.376
5	Buatan II	801	1.521	1.586	3.107
6	Sengkemang	349	674	667	1.372
7	Rantau Panjang	372	676	696	1.372
8	Empang Pandan	719	1.320	1.253	2.573
9	Sri Gemilang	172	316	298	614
10	Keranji Guguh	584	1.010	1.015	2.025
11	Tasik Semina	310	572	542	1.114
<b>Jumlah Penduduk</b>		<b>5.483</b>	<b>10.688</b>	<b>10.403</b>	<b>21.091</b>

*Sumber: Kantor Kecamatan Koto Gasib 2018, 2021*

## 4.2 Kampung Teluk Rimba

### 4.2.1 Geografis

Kampung Teluk Rimba merupakan salah satu kampung dari 11 kampung yang berada di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, dengan jarak dari pusat kota di Kecamatan Koto Gasib adalah 18, 2 Km dari dari pusat kota di Kabupaten Siak adalah 115,0 Km. Kampung Teluk Rimba berbatasan dengan:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Sungai Selodang
2. Sebelah timur berbatasan dengan Buatan 1 dan Teluk Lancang
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Pangkalan Pisang
4. Sebelah barat berbatasan dengan Gasib

Sebagian besar wilayah daerah kampung Teluk Rimba merupakan dataran rendah dan tanah gambut dengan luas wilayah 69,2 Km, dan terdiri beberapa anak sungai dari aliran Sungai Siak. Adapun anak sungai yang terdapat di kampung Teluk Rimba adalah sebagai berikut:

**Tabel IV. 4 Sungai-Sungai yang Berada di Wilayah Kampung Teluk Rimba.**

No	Nama Sungai
1.	Sungai Sagu Boso
2.	Sungai Sagu Kocik
3.	Sungai Segintil
4.	Sungai Banso
5.	Sungai Suak Selano

*Sumber: Kantor Kampung Teluk Rimba, 2021*

Kampung Teluk Rimba terbagi menjadi dua dusun yang dipisahkan langsung oleh Sungai Siak. Tingkat kesuburan tanah di Kampung Teluk Rimba secara umum adalah sedang dengan sebagian lahan pertanian digunakan untuk perkebunan yang meliputi: perkebunan Kelapa Sawit, Perkebunan Karet, dan Permukiman penduduk. kampung Teluk Rimba merupakan dataran lembah dengan permukaan jalan terluas adalah tanah.

#### **4.2.2 Pemerintahan**

Kampung Teluk Rimba terbentuk sebagai institusi eksekutif yang berperan dalam menjalankan roda pemerintahan dan pemberdayaan serta pembangunan masyarakat merupakan perpanjangan tangan dari otonomi pemerintahan Kecamatan Koto Gasib, dan merupakan aspirasi dari masyarakat untuk mempermudah penduduk dalam hal pelaksanaan kepengurusan administrasi serta lebih mendekatkan jarak antara pemerintah dengan penduduk yang di perintahnya.

Kampung Teluk Rimba merupakan Kampung dibawah naungan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak. Kampung Teluk Rimba masih dikategorikan sebagai kampung Swakarya atau kampung yang masih berkembang. Posisi pusat pemerintahan Kantor kampung Teluk Rimba ada di Dusun Banso dengan jarak kurang lebih dari pusat kota di Kecamatan Koto Gasib adalah 18, 2 Km dari dari pusat kota di Kabupaten Siak adalah 115,0 Km. Berikut ini adalah tabel dari klasifikasi Perangkat Pemerintahan kampung Teluk Rimba berdasarkan Jabatan dan Tingkat Pendidikannya:

**Tabel IV. 5 Klasifikasi Perangkat Kampung Teluk Rimba Berdasarkan Jabatan dan Tingkat Pendidikan.**

No	Nama	Jabatan	Tingkat Pendidikan
1	Mubarak	Penghulu	SLTA
2	Rudi Purnawas	Kerani	SLTA
3	Syamsuar	Badan Permusyawaratan Kampung	SLTP
5	Darmawan	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	SLTA
6	Novrida Talis	Kepala Urusan Keuangan	SLTA
7	Susi Maini	Juru Tulis I	SLTA
8	Al Sofyan	Juru Tulis II	SLTA
9	Khaidir	Kepala Dusun Segintil	SLTA
10	Zaipul	Kepala Dusun Banso	SLTA
11	Budiono	Ketua RK 01	SD
12	Jon Hendri	Ketua RK 02	SLTP
13	Indra	Ketua RT 01	SLTA
14	Razid	Ketua RT 02	SLTP
15	Abdul Hadi	Ketua RT 03	SD
16	Andre	Ketua RT 04	SD

*Sumber: Kantor Desa Teluk Rimba, 2021*

Di kampung Teluk Rimba terdapat dua dusun, yaitu dusun Segintil dan dusun Banso yang dipisahkan langsung oleh Sungai Siak, dan memiliki dua pelabuhan. Di kampung Teluk Rimba empat RT dan 2 RK.

### 4.2.3 Kependudukan

Kampung Teluk Rimba terdiri dari dua Dusun yang dipisahkan oleh aliran Sungai Siak, dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 684 jiwa dengan 183 KK. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk di Kampung Teluk Rimba berdasarkan tingkat pendidikan:

**Tabel VI. 6 Klasifikasi Penduduk Kampung Teluk Rimba Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Klarifikasi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	PAUD	28
2	TK	3
3	SD	77
4	SMP	30
5	SMA	77
6	Akademi	10
7	Sarjana	7
8	Tidak Tamat Sekolah SD/SMP/SMA	115
9.	Tidak Sekolah	337
<b>Jumlah Penduduk</b>		<b>684</b>

*Sumber: Kantor Desa Teluk Rimba, 2021.*

## 4.3 Gambaran Umum Pendampingan Desa

### 4.3.1 Struktur Pelaksanaan Pendampingan Desa

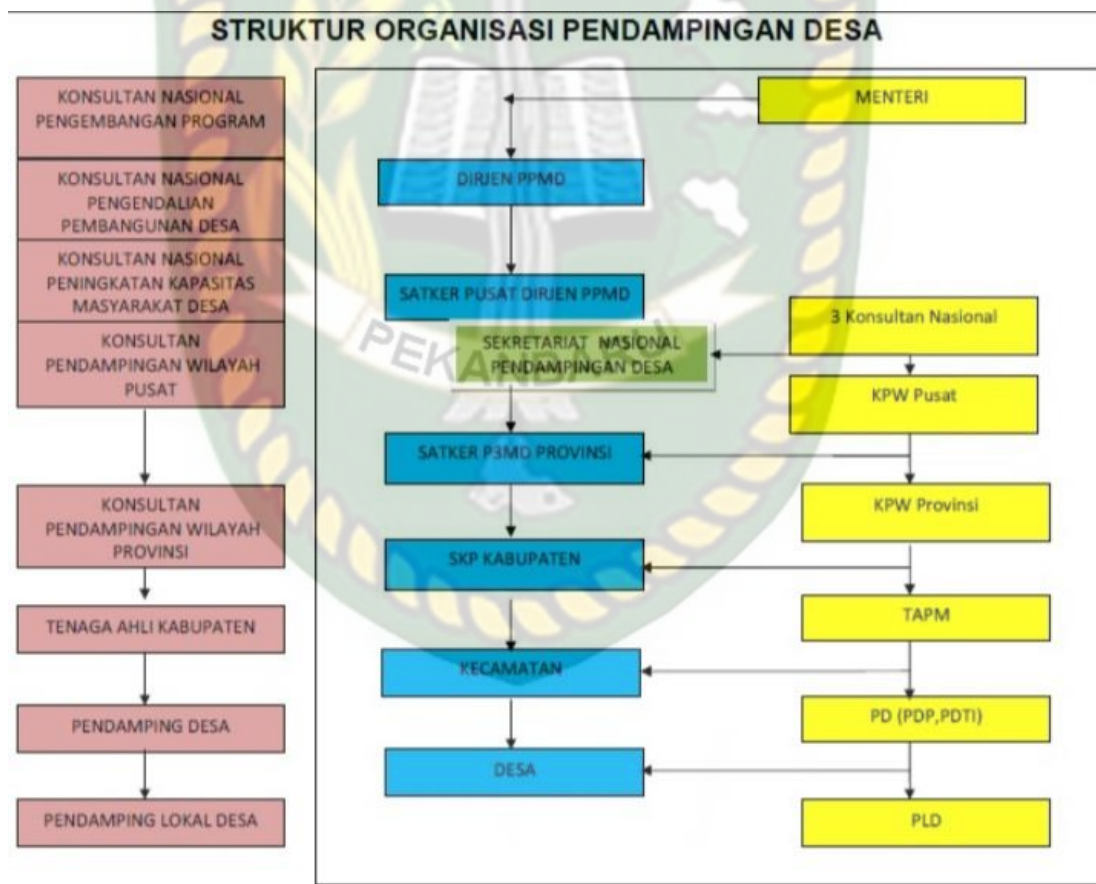
Dalam hal ini terdapat tujuan terbentuknya Pendamping Desa, yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa.
2. Meningkatkan prakarsa, partisipasi, dan kesadaran masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif.
3. Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor desa.

4. Mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris.

Untuk mensukseskan tujuan dari dibentuknya pendamping desa tersebut, maka pelaksanaan pendampingan harus dijalankan dengan maksimal. Oleh karena itu pendamping desa haruslah dikelola secara sungguh-sungguh, oleh karena itu pendamping desa harus dapat menunjukkan semangat dan kesungguhan dalam melaksanakan segenap tugas dan fungsinya dalam meningkatkan pembangunan desa. Dalam hal ini struktur pendamping desa dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar IV.2 Struktur Organisasi Pendamping Desa



Sumber: kemlagi.desa.id

### 4.3.2 Profil Pendamping Desa Teluk Rimba

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Desa, pada Pasal 18 Ayat (2) menjelaskan bahwa Pendamping Lokal Desa bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kerja sama desa, Pengembangan Badan Usaha Milik Desa, dan pembangunan berskala lokal desa.

Fasilitasi dapat dilakukan dengan cara-cara inovatif dan kreatif dengan acuan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta aturan pelaksanaannya. Masyarakat desa difasilitasi belajar untuk mampu mengelola kegiatan pembangunan ekonomi desa secara mandiri untuk menunjang kesejahteraan masyarakat desa. Pengembangan kapasitas di desa ini dikelola langsung oleh masyarakat sebagai bagian dari proses belajar sosial.

Pendamping Desa di Desa Teluk Rimba terdiri dari lima orang pendamping bagian APBN. Berikut tabel tentang profil dari Pendamping Desa di Teluk Rimba:

**Tabel VI. 7 Profil Pendamping Desa di Kampung Teluk Rimba Kecamatan Koto Gasib.**

No	Nama	Tingkat Pendidikan	Jabatan
1.	Agus Siaturrahman, S.Kom.	Strata Satu (S1)	Pendamping Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa (ADK).
2.	Wawan Setiawan.	SMK	Pendamping Lokal Desa (PLD)
3.	Yurnalis, ST.	Strata Satu (S1)	Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI)
4.	Mawardi, S. Sos.	Strata Satu (S1)	Pendamping Pemberdayaan Desa (PPD)
5.	Lesi Susanti, ST.	Strata Satu (S1)	Pendamping Pemberdayaan Desa (PPD)

*Sumber: Kantor Desa Teluk Rimba, 2021.*

Kerangka pikir dari pembangunan ekonomi masyarakat kampung dan penerapan tentang Undang-Undang kampung haruslah dikawal oleh pendamping kampung yang bertugas mengajarkan aturan legal kepada masyarakat kampung. Pendampingan dan pelatihan dari pendamping desa kepada masyarakat kampung diharapkan dapat mempercepat proses internalisasi Undang-Undang Desa sebagai sebuah proses pembiasaan sosial dalam diri masyarakat.

### 4.3.3 Pendamping Lokal Desa Teluk Rimba

Pendamping Lokal Desa yang ada di Teluk Rimba berjumlah satu orang dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

➤ Tugas Pendamping Lokal Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Desa menyatakan bahwa tugas Pendamping Lokal Desa adalah sebagai berikut:

- Mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- Mendampingi desa dalam kerja sama desa
- Mendampingi desa dalam pembangunan badan usaha milik desa
- Mendampingi desa dalam pembangunan berskala lokal.

Adapun fungsi dari Pendamping Lokal Desa menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Desa adalah sebagai fasilitasi, edukasi, mediasi dan advokasi.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 5.1 Identitas Informan

Sebelum masuk pada substansi hasil penelitian dan pembahasan dalam sebuah penelitian peneliti akan memaparkan identitas informan sebagai sumber memperoleh data dan informasi. Dalam penelitian identitas informan sangat penting untuk dijelaskan agar para pembaca merasa yakin bahwa penelitian yang dilakukan peneliti asli dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan, karena apabila penelitian yang dilakukan dengan jelas pastilah telah sesuai dengan substansi penelitiannya.

Dalam penelitian Hasil Penelitian Tentang Evaluasi Tugas Pendamping Desa Dalam Upaya Pembangunan Desa Di Kampung Teluk Rimba Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak ini Penulis akan menjelaskan mengenai identitas informan yang diteliti. Hal-hal yang akan dijelaskan pada pembahasan ini adalah mengenai jenis kelamin, usia, dan pendidikan informan. Untuk lebih jelas mengenai identitas responden dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel V.I Identitas Informan Penelitian Evaluasi Tugas Pendamping Lokal Desa dalam Upaya Pembangunan Desa di Teluk Rimba.**

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	Wiwiet Novita, S.Si	Tenaga Ahli PPPMD Kabupaten Siak	S1
2.	Setiyawan	Pendamping Lokal Desa (PLD)	SLTA
3.	Mubarak	Pemghulu	SLTA
4.	Rudi Purnawas	Kerani	SLTA
5.	Syamsuar	Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM)	SLTP
6.	Khaidir	Masyarakat Kampung (Kepala Dusun)	SLTA
7.	Razid	Masyarakat Kampung (Ketua RT 001)	SLTP
8.	Syahrizal	Masyarakat Kampung	SLTA
9.	Arjunalis	Masyarakat Kampung	SD
10.	Suriyani	Masyarakat Kampung	SD

*Sumber: Hasil Olahan Data Lapangan, 2021.*

### 5.1.1 Jenis Kelamin

Dalam identitas informan berdasarkan jenis kelamin ini penulis membedakan antara jenis kelamin pria dan wanita. Untuk mengetahui lebih jelas identitas informan berdasarkan jenis kelamin informan dalam penelitian ini maka akan penulis jabarkan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel V. 2 Jenis Kelamin Informan**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	8	80%
2	Perempuan	2	20%
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Hasil Olahan Data Lapangan, 2021.*

### 5.1.2 Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang sangat berpengaruh terhadap pola berfikir, bersikap, dan wawasan pengetahuan yang dimiliki seseorang. Biasanya seseorang yang berpendidikan tinggi maka pola berpikirnya juga semakin matang. Untuk mengetahui lebih jelas identitas informan berdasarkan tingkat pendidikan informan dalam penelitian ini maka akan penulis jabarkan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel V.3 Tingkat Pendidikan Informan**

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	2	20%
2	SLTP	2	20%
3	SLTA	5	50%
4	Sarjana (S1)	1	10%
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Hasil Olahan Data Lapangan, 2021.*

### 5.1.3 Tingkatan Umur

Umur merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap kematangan pola pikir dan kinerja seseorang, semakin dewasa dalam menyikapi berbagai persoalan masalah dan pengetahuan yang dimilikinya juga semakin tinggi. Selain itu, umur juga dapat berpengaruh terhadap seseorang dalam melaksanakan semua tugas-tugas yang diberikan. Untuk mengetahui lebih jelas identitas informan berdasarkan tingkat umur informan dalam penelitian ini maka akan penulis jabarkan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel V.4 Tingkatan Umur**

<b>NO</b>	<b>Tingkatan Umur</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
1	31-35 Tahun	1	10%
2	36-40 Tahun	3	30%
3	41-45 Tahun	3	30%
4	46-50 Tahun	2	20%
5	>50 Tahun	1	10%
	<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Hasil Olahan Data Lapangan, 2021.*

## 5.2 Hasil Penelitian Tentang Evaluasi Tugas Pendamping Lokal Desa Dalam Upaya Pembangunan Desa Di Teluk Rimba

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Desa, pada Pasal 18 Ayat (2) menjelaskan bahwa Pendamping Lokal Desa bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kerja sama desa, Pengembangan Badan Usaha Milik Desa, dan pembangunan berskala lokal desa.

Konsep yang digunakan Evaluasi menurut William N. Dunn (2000) (dalam Sari dan Marom, 2019: 7) ada beberapa indikator yang sangat berperan penting dalam mengevaluasi tugas pendamping lokal desa dalam meningkatkan pembangunan ekonomi desa yaitu:

1. Efektifitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Ketepatan
5. Responsivitas
6. Perataan

Kategori wawancara dalam penelitian ini telah diklasifikasikan, peneliti mempertanyakan hal-hal lain yang menyangkut dengan kategori yang lainnya. Peneliti ingin mendapatkan informasi dan jawaban yang terbaik dari semua informan. Beberapa indikator tersebut adalah kerangka pikir bagi peneliti dalam melakukan penelitian terhadap Evaluasi Tugas Pendampig Lokal Desa dalam Upaya

Meningkatkan Pembangunan Desa di Teluk Rimba Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak. Maka dari itu dapat dijelaskan melalui data dan informasi yang diperoleh langsung dari informan dan juga temuan di lapangan hasil penelitian, akan peneliti jabarkan sebagai berikut:

### **1. Efektifitas**

Apabila tujuan-tujuan dalam organisasi pencapaiannya semakin besar, maka semakin besar pula efektifitasnya. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya suatu pencapaian besar dalam sebuah organisasi, maka semakin besar pula hasil yang akan tercapai dari tujuan tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat William M. Dunn (2003) (dalam Lejiu. Dkk, 2014: 518) menyatakan bahwa efektifitas menyangkut pada apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan seseorang untuk menghasilkan sesuatu sesuai dengan yang diharapkan, apabila suatu pekerjaan itu dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan maka dapat dikatakan efektif. Efektifitas dalam hal ini menunjukkan bagaimana Evaluasi Tugas Pendamping Lokal Desa dalam Upaya Pembangunan Desa di Teluk Rimba Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.

❖ **Meningkatkan Kapasitas, Efektifitas dan Akuntabilitas Pembangunan Desa.**

Meningkatkan kapasitas, efektifitas dan akuntabilitas pembangunan desa merupakan salah satu tujuan dari keberadaan Pendamping Lokal Desa. Adapun wilayah kerja Pendamping Lokal Desa ini berada di desa. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di desa Teluk Rimba bahwa dalam hal meningkatkan kapasitas, efektifitas, dan akuntabilitas pembangunan desa secara normatif bahwa tujuan itu sudah tercapai, walaupun untuk menuju kesempurnaan masih dalam proses usaha untuk mencapainya.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Wiwiet Novita, S.Si selaku Tenaga Ahli PPPMD Kabupaten Siak dalam wawancaranya Rabu 10 Februari 2021 mengatakan bahwa:

*“Kalau mengenai peningkatan kapasitas, efektifitas, dan akuntabilitas pembangunan desa sampai hari ini kami rasakan terus ada perbaikan. Menurut kami salah satu dampak dari adanya Pendamping Lokal Desa ini setiap desa lebih terkoordinir dan kami rasa masih sangat efektif”.*

Ibu Wiwiet Novita, S.Si juga menjelaskan bahwa dalam hal kapasitas pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintahan desa di desa Teluk Rimba sudah cukup memuaskan.

*“Hal ini kami karena memang sampai saat ini kapasitas pembangunan infrastruktur di desa Teluk Rimba Terus mengarah kepada hal-hal yang positif”.*

Selanjutnya berdasarkan observasi langsung dilapangan, dalam hal efektifitas, peneliti katakan cukup baik karena memang pembangunan yang selama ini dilakukan di desa Teluk Rimba juga merupakan pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat desa, contohnya penimbunan jalan yang rusak, pembangunan Teras Masjid, WC dan tempat wudhu masjid yang lebih baik dan lain sebagainya, dan hal ini juga sampai saat ini bisa dipertanggung jawabkan akuntabilitasnya.

Sesuai dengan hasil wawancara Bapak Syamsuar selaku Badan Permusyawaratan Desa Teluk Rimba pada Kamis 11 Februari 2021 terkait dengan manfaat dari program pembangunan ekonomi desa di Teluk Rimba menyatakan bahwa:

*“Sejak adanya Pendamping Lokal Desa ini, masyarakat di Teluk Rimba ini kehidupannya semakin memulai membaik. Karena memang selama ini mereka sulit dalam menikmati infrastruktur, sekarang menurut kami mereka lebih bisa menikmatinya.*

Dalam hal ini Bapak Khaidir selaku masyarakat desa sekaligus Kepala Dusun Segintil Desa Teluk Rimba Sabtu 20 Februari 2021 juga mengatakan bahwa:

*“Dengan adanya Pendamping Lokal Desa, menurut kami masyarakat merasa terbantu terutama mengenai pembangunan infrastrukturnya kami sudah dapat menikmatinya. Misalnya dalam infrastruktur jalan contohnya, selama ini kami untuk menjual hasil kebun seperti sawit dan karet mereka sangat sulit karena memang jalan keluar masuk desa Teluk Rimba tidak sebagus seperti sekarang. Kalau sekarang kan sudah mulai cukup baik lah, jadi mau memasarkan hasil kebun sawit dan karet kami sudah semakin mudah”.*

Senada dengan masyarakat desa Teluk Rimba yaitu Bapak Syahrizal Sabtu 20 Februari 2021 juga mengatakan bahwa:

*“Selama beberapa tahun ini di Desa Teluk Rimba, saya melihat perubahan dari pembangunan desa terus meningkat. Kemudian pertanggungjawaban desa juga semakin baik dan rapi”.*

Namun disisi lain staff pemerintah desa yang ada di desa Teluk Rimba menganggap bahwa keberadaan Pendamping Lokal Desa ini belum memberikan dampak yang memuaskan. Bagi mereka keberadaan Pendamping Lokal Desa ini malah menjadikan mereka seolah memiliki tanggung jawab baru dalam bentuk keharusan mereka untuk berkomunikasi dengan Pendamping Lokal Desa yang ada. Disisi lain menurut mereka kemampuan Pendamping Lokal Desa juga tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik.

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Bapak Mubarak selaku Kepala Desa Teluk Rimba Kamis 11 Februari 2021 mengatakan bahwa:

*“Saya menganggap bahwa keberadaan Pendamping Lokal Desa saya tidak memiliki dampak yang memuaskan. Karena selama hampir 2 tahun saya menjabat saya melihat Pendamping Lokal Desa itu juga gak memiliki kemampuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang kami hadapi di desa kami”.*

Hal yang dikatakan oleh Bapak Mubarak tersebut juga hampir sama dikatakan oleh semua staff pemerintahan desa Teluk Rimba yang Peneliti wawancarai dalam penelitian ini. Kemudian ketika Pendamping Lokal Desa yang ada di desa Teluk

Rimba ini di wawancarai yaitu Bapak Setiyawan Rabu 17 Februari 2021 menyatakan bahwa:

*“Memang sulit untuk berkomunikasi dengan para staff pemerintahan desa untuk melakukan pendampingan, menurut saya ini harusnya menekankan kewajiban untuk mengikuti arahan yang telah diberikan”.*

Seperti halnya hasil dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa untuk meningkatkan kapasitas, efektifitas dan akuntabilitas pembangunan desa di Teluk Rimba yang mana tujuan itu sudah tercapai, dan untuk menuju kesempurnaan masih dalam proses usaha untuk mencapainya. Walaupun dalam hal ini keberadaan dari Pendamping Lokal Desa dalam pencapaian tersebut belumlah tercapai secara efektif.

Berdasarkan hasil observasi penulis ke kantor Desa Teluk Rimba Kecamatan Koto Gasib diketahui untuk mencapai efektifitas dalam hal meningkatkan kapasitas, efektifitas, dan akuntabilitas pembangunan desa secara normatif bahwa tujuan itu sudah tercapai, namun masih kurang maksimal dan perlu untuk ditingkatkan lagi karena dalam hal ini keberadaan Pendamping Lokal Desa yang belum memiliki dampak yang memuaskan, hal ini dapat dilihat dari kinerja Pendamping Lokal Desa yang tidak disiplin dan kurang memiliki kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul di desa Teluk Rimba.

## 2. Efisiensi

Bila berbicara mengenai efisiensi pastinya kita akan membayangkan hal penggunaan sumber daya kita yang secara optimal untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Efisiensi dan aktivitas itu sangatlah berhubungan, maksudnya adalah efisiensi akan terjadi jika pengguna sumber daya diberdayakan secara optimal sehingga suatu tujuan itu akan tercapai. William M. Dunn (2003) (dalam Lejiu. Dkk, 2014: 518) juga berpendapat bahwa efisiensi berhubungan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Dalam hal ini efisiensi dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk melaksanakan sesuatu dengan baik dan tepat waktu tanpa harus membuang tenaga, waktu dan biaya. Efisiensi dalam ini pun menunjukkan bagaimana Evaluasi Tugas Pendamping Lokal Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa di Teluk Rimba Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.

### ❖ **Meningkatkan Prakarsa, Kesadaran, dan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan Desa yang Partisipatif.**

Dalam hal meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif, peneliti melihat bahwa Pendamping Lokal Desa belum memiliki dampak yang baik. Karena dalam penelitian ini, berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan para informan yang kami lakukan sebagian besar informan mengatakan bahwa tidak ada dampak yang signifikan terhadap prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Mubarak selaku Kepala Desa Teluk Rimba Kamis 11 Februari 2021 bahwa keberadaan Pendamping Lokal Desa ini tidak mampu membuat prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat meningkat untuk meningkatkan pembangunan desa:

*“Saya tidak ada melihat ada dampak yang positif dari keberadaan Pendamping Lokal Desa ini terhadap masyarakat kami. Menurut penglihatan saya selama ini yang melakukan ajakan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan itu perangkat kami, bukan Pendamping Lokal Desa”.*

Senada dengan Bapak Rudi Purnawas yang merupakan Sekretaris Desa Teluk Rimba Kamis 11 Februari 2021 mengatakan tidak melihat kemampuan Pendamping Lokal Desa yang ada di desa Teluk Rimba untuk meningkatkan prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakatnya selama ini. Menurutnya masyarakat di desa Teluk Rimba ini memang dari dulu sudah terbiasa melakukan gotong royong dalam pembangunan yang ada di desa khususnya untuk bangunan yang diperuntukkan untuk kepentingan bersama:

*“Sejauh ini saya tidak ada melihat Pendamping Lokal Desa yang ada di desa kita ini memberikan dampak terhadap masyarakat desa dalam hal prakarsa, kesadaran, dan partisipasinya dalam pembangunan. Masalahnya ini kalau untuk partisipasi pembangunan, selama ini masyarakat kita memang sudah terbiasa bergotong royong.”*

Bapak Rudi Purnawas yang merupakan Sekretaris Desa Teluk Rimba Kamis 11 Februari 2021 juga menambahkan bahwa:

*“ Apalagi untuk pembangunan yang sifatnya untuk kebersamaan desa ini. Contohnya gotong royong dalam pembagunan gorong-gorong, masyarakat kita bisa bergotong royong itu, jadi gak ada pengaruh dari Pendamping Lokal Desa disitu”.*

Kemudian dalam hal ini dikonfirmasi kepada tenaga Pendamping Lokal Desa yaitu Bapak Setiyawan Pada Rabu 17 Februari 2021 bahwa ia mengatakan posisinya yang kurang jelas dalam pendampingan ini. Menurutnya selama ini yang seharusnya Pendamping Lokal Desa sebagai ahli dalam pemerintahan desa dalam berbagai sektor, namun kenyataannya dalam keseharian Pendamping Lokal Desa itu seperti menjadi staff dalam pemerintahan desa:

*“Saya bingung dengan posisi saya di desa ini. Kalau seharusnya kan saya ini sebagai tim ahli di desa ini, tapi kenyataannya saya ini seolah seperti perangkat desa yang membuat program desa. Saya kan bukan perangkat desa. Jadi untuk permasalahan seperti ini saya lebih sering diskusi dengan perangkat desa”.*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa di desa Teluk Rimba dalam hal meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang pastisipatif, peneliti melihat bahwa Pendamping Lokal Desa belum memiliki dampak yang baik.

Berdasarkan hasil observasi penulis ke kantor Desa Teluk Rimba Kecamatan Koto Gasib, diketahui untuk mencapai efisiensi dalam hal meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang

partisipatif, penulis melihat bahwa Pendamping Lokal Desa belum memiliki dampak yang baik. Karena hal ini sangat tergantung pada kemampuan dari Pendamping Lokal Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan kegiatan untuk mengubah pola pikir masyarakat terhadap pembangunan desa agar prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat lebih meningkat dan berubah terhadap pembangunan desa.

### **3. Kecukupan**

Dalam kebijakan publik kecukupan dapat dikatakan bahwa tujuan yang telah dicapai sudah dapat dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Dalam hal ini William M. Dunn (2003) (dalam, Lejiu. Dkk, 2014: 519) mengemukakan bahwa kecukupan berhubungan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, dan kesempatan yang dapat menimbulkan masalah. Hal ini dapat dikatakan bahwa arti dari kecukupan itu ialah seberapa jauh tingkat efektifitas suatu kebijakan jika telah ditetapkan apakah dapat mencukupi tingkat efektifitasnya atau sudah diimplementasikan oleh masyarakat. Kecukupan dalam hal ini menunjukkan bagaimana Evaluasi Tugas Pendamping Lokal Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa di Teluk Rimba Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.

### ❖ Meningkatkan Sinergi Program Pembangunan Desa Antar Sektor

Dalam hal meningkatkan sinergi program pembangunan antar sektor, keberadaan Pendamping Lokal Desa dinilai belumlah memiliki dampak yang memuaskan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Teluk Rimba yakni Bapak Mubarak pada hari Kamis 11 Februari 2021, menurutnya keberadaan Pendamping Lokal Desaitu seharusnya memiliki dampak yang baik dalam hal meningkatkan sinergi program pembangunan antar sektor. Namun menurut Kepala Desa Teluk Rimba ada permasalahan ketidakmampuan Pendamping Lokal Desa untuk memahami permasalahan yang datang:

*“Seharusnya kan dalam hal ini keberadaan dari Pendamping Lokal Desa dapat mencari solusi permasalahan yang kita hadapi, namun pada kenyataannya hari ini keberadaan Pendamping Lokal Desa belum cukup mampu memberikan solusi yang baik”.*

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Rudi Purnawas selaku Sekretaris Desa Teluk Rimba pada hari Kamis 11 Februari 2021 menyatakan bahwa:

*“Sekarang banyak sekali Pendamping Desa yang tidak sesuai dengan jurusan akademiknya, misalnya sarjana ekonomi jadi Pendamping Pembangunan, sarjana teknik jadi pendamping ekonomi. Itukan terbalik. Maaf cakap bahkan yang jadi Pendamping Lokal Desa kita saat ini itu lulusan Akademik SMK, ini yang saya sesalkan”.*

Bapak Rudi Purnawas juga berpendapat bahwa keberadaan Pendamping Desa tidak sesuai dengan keahliannya dalam bidang akademik, ia juga menambahkan bahwa:

*“Menurut saya secara pribadi keberadaan Pendamping Desa itu kan harusnya memberikan dampak yang baik untuk desa dan bisa membantu dan membimbing kami para staff desa yang hanya lulusan SMA, kan sama-sama kita ketahui semua staff disini hanyalah lulusan SMA”.*

Selanjutnya Ibu Wiwiet Novita, S. Si selaku Tim Tenaga Ahli Bidang Tenaga Ahli PPPMD Kabupaten Siak menyatakan bahwa:

*“Kalau masalah akademik sebenarnya itu sudah kita lakukan melalui seleksi yang ketat, selain melakukan seleksi ini kami juga melakukan bimbingan pelatihan sebelum menerjunkan mereka secara langsung ke masyarakat”.*

Selanjutnya Pendamping Lokal Desa yakni Bapak Setiyawan pada hari Rabu 17 Februari menyatakan bahwa ia tidak mempersalahkan apa yang dipermasalahkan oleh pemerintah desa Teluk Rimba, ia mengatakan bahwa:

*“Saya bekerja, syarat pun sudah saya penuhi kemudian saya lolos seleksi. Kalau masalah jurusan akademik itu menurut saya tidak relevan. Masalahnya bukan saya gak mampu, kemampuan itu kan gak diukur dari jurusan akademiknya. Saya juga gak memungkiri, ya mungkin masih banyak yang tidak sesuai. Namanya saya juga manusia ya pastilah ada salahnya”.*

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa di desa Teluk Rimba dalam hal meningkatkan sinergi program pembangunan antar sektor, keberadaan Pendamping Lokal Desa dinilai belumlah memiliki dampak yang memuaskan.

Berdasarkan hasil observasi penulis ke kantor Desa Teluk Rimba Kecamatan Koto Gasib dalam hal meningkatkan sinergi program pembangunan antar sektor, keberadaan Pendamping Lokal Desa dinilai belumlah memiliki dampak yang memuaskan. Hal ini karena adanya permasalahan ketidakmampuan Pendamping Lokal Desa untuk memahami permasalahan yang datang, ini disebabkan oleh tingkat pendidikan yang dimiliki oleh Pendamping Lokal Desa dan jurusan akademiknya, hal ini memberikan dampak yang kurang baik untuk Pendamping Lokal Desa dan para staff desa yang hanya lulusan SMA.

#### **4. Ketepatan**

Ketepatan adalah acuan pada nilai dari tujuan program dan kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut. Menurut William M. Dunn (2003) (dalam, Lejiu. dkk 2014: 520) ketepatan merupakan suatu kriteria yang dipakai untuk menyeleksi sejumlah alternative untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil yang direkomendasikan tersebut merupakan tujuan yang layak. Dalam hal ini ketepatan dapat diartikan sebagai kepastian penerapan yang dilakukan dengan kegiatan terarah dengan tujuan pencapaian tugas pelaksanaan yang telah ditetapkan. Ketepatan dalam hal ini menunjukkan pada Evaluasi Tugas Pendamping Lokal Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa di Teluk Rimba Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.

### ❖ Mengoptimalkan Aset Lokal Desa

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan dalam penelitian ini, tugas Pendamping Lokal Desa dalam hal meningkatkan aset lokal desa menurut peneliti belum juga memiliki dampak yang signifikan.

Seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa Teluk Rimba, Bapak Mubarak Kamis 11 Februari 2021 mengatakan bahwa:

*“Saya melihat bahwa tidak ada peningkatan yang signifikan dari keberadaan Pendamping Lokal Desa ini, khususnya dalam hal mengoptimalkan aset lokal desa. Gak ada pengaruhnya sama sekali.”*

Menurut Bapak Mubarak keberadaan Pendamping Lokal Desa ini belum mampu memberikan dampak yang positif dalam setiap hal, khususnya dalam pengoptimalan aset lokal desa secara emansipatoris.

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Razid selaku masyarakat desa sekaligus Ketua RT 002 Dusun Segintil Desa Teluk Rimba pada hari Sabtu 20 Februari 2021, menyatakan bahwa:

*“Di desa kita ini saya lihat tidak ada peningkatan yang signifikan, karena selama ini yang terus mengoptimalkan aset desa itu ya kita sendiri”.*

Hal yang demikian juga disampaikan oleh Bapak Syamsuar selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Teluk Rimba pada hari Kamis 11 Februari 2021, menyatakan bahwa:

*“Menurut yang saya lihat Pendamping Lokal yang ada di desa kita ini tidak memiliki kemampuan untuk membantu mengoptimalkan aset lokal desa kita,*

*karena selama ini kami anggota BPD dan perangkat desa kita yang terus berupaya untuk mengoptimalkan aset desa kita ini”.*

Namun selanjutnya Ibu Wiwiet Novita, S. Si selaku Tim Tenaga Ahli Bidang Tenaga Ahli PPPMD Kabupaten Siak menyatakan bahwa:

*“Saya tidak mengetahui pasti bagaimana dampak yang sesungguhnya, namun yang saya lihat sejauh ini sudah banyak aset lokal desa yang telah teroptimalkan di desa yang ada di Kabupaten Siak ini”.*

Ibu Wiwiet Novita, S. Si selaku Tim Tenaga Ahli Bidang Tenaga Ahli PPPMD Kabupaten Siak menyatakan bahwa untuk hal itu memang menjadi harapannya untuk terjadi optimalisasi, dan menurutnya setekah mereka melakukan bimbingan pelatihan dan monitoring mereka berharap untuk perbaikan dalam hal itu.

Kemudian disampaikan juga oleh Bapak Setiyawan selaku Pendamping Lokal Desa Teluk Rimba pada hari Rabu 17 Februari menyatakan bahwa:

*“ Memang saya akui bahwa memang sulit untuk meningkatkan aset lokal desa ini, saya tidak ngerti aset apa yang perlu ditingkatkan. Dapatlah kita lihat sendiri di desa Teluk Rimba ini entah apa yang mau dioptimalkan”.*

Bapak Setiyawan selaku Pendamping Lokal Desa Teluk Rimba menyatakan bahwa ia mengakui sampai saat ini memang sulit untuk meningkatkan aset lokal desa di Teluk Rimba.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa di desa Teluk Rimba dalam hal mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris belum terlaksana dengan optimal. Hal ini disebabkan karena ketidakpahaman dari Pendamping Lokal

Desa, selain itu juga disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran desa Teluk Rimba terhadap pemahamannya tentang optimalisasi aset yang dimiliki desanya sendiri.

Berdasarkan hasil observasi penulis ke kantor Desa Teluk Rimba Kecamatan Koto Gasib dalam hal meningkatkan aset lokal desa secara emansipatoris menurut peneliti belum juga memiliki dampak yang signifikan, karena belum terlaksanadengan optimal. Hal ini disebabkan karena ketidapkahaman dari Pendamping Lokal Desa, selain itu juga disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran desa Teluk Rimba terhadap pemahamannya tentang optimalisasi aset yang dimiliki desanya sendiri. Dan perlu adanya pengarahan dari Tenaga Ahli dari Pendamping Desa.

## **5. Responsivitas**

Dalam hal ini responsivitas dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. William M.Dunn (2003) (dalam Letjiu. dkk, 2014: 519) mengatakan bahwa responsivitas berhubungan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan memuaskan kelompok masyarakat. Jadi dalam hal ini responsivitas dapat diartikan sebagai suatu kemampuan birokrasi untuk melaksanakan pengembangan program-program sesuai dengan kebutuhan yang hendak dicapai. Responsivitas dalam hal ini adalah bagaimana upaya Pendamping Lokal Desa dalam meningkatkan Pembangunan Desa di Teluk Rimba Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.

### ❖ Meningkatkan Pengembangan Badan Usaha Milik Kampung di Teluk Rimba

Di desa Teluk Rimba terdapat Badan Usaha Milik Kampung yang berdiri pada tahun 2015 dengan dasar Peraturan Desa Nomor 006/XX/2015 dan SK Nomor 019KPTS/TR/2017. Badan Usaha Milik Kampung Teluk Rimba diberi nama BUMKAM Rimba Mandiri dengan unit usaha berupa Simpan Pinjam, dengan memperoleh omset Rp. 585. 067. 033 dengan keuntungan sebesar Rp. 16. 000. 000. Namun berdasarkan wawancara dengan Bapak Mubarak selaku Penghulu Kampung Teluk Rimba Kamis 11 Februari 2021 bahwa Badan Usaha Milik Kampung Teluk Rimba ini tidak berjalan dengan baik, beliau mengatakan bahwa:

*“ Simpan Pinjam ini berjalan baik itu hanya 3 tahunan, itu sekitar dari tahun 2015 sampai 2018. Itu karena masyarakat yang ikut terlibat rata-rata lebih dominan meminjam dari pada menyimpan sehingga banyak yang menunggak dan tidak membayar cicilan sehingga uang tersebut tidak dapat diputar lagi”.*

Selain itu Kerani Kampung Teluk Rimba yakni Bapak Rudi Purnawas pada 11 Februari 2021 bahwa desa juga menambahkan bahwa simpan pinjam ini tidak optimal disebabkan oleh masyarakat itu sendiri karena uang dari simpan pinjam ini tidak digunakan untuk diproduktif oleh masyarakat melainkan untuk dikomsumtif. Beliau mengatakan bahwa:

*“ Hampir dari seluruh masyarakat yang meminjam di unit simpan pinjam BUMKAM Rimba Mandiri ini tidak digunakan untuk modal usaha melainkan untuk dikonsumsi. Misalnya untuk biaya anak sekolah keperguruan tinggi, bahkan ada yang digunakan untuk membangun rumah”.*

Hal ini senada dengan yang dijelaskan oleh bapak Syamsuar selaku Ketua Badan Permusyawaratan Kampung Teluk Rimba pada Kamis 11 Februari 2021 terkait dengan Badan Usaha Milik Kampung yang tidak berjalan dengan baik, beliau menyatakan bahwa:

*“ Mengenai perkembangan BUMKAM kampung kita yang tidak berjalan dengan baik, boleh dikatakan macetlah. Itu disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat mengenai fungsi dari simpan pinjam itu sendiri untuk apa, kan sama-sama kita ketahui bahwa unit itu dibentuk untuk menunjang perekonomian masyarakat desa kita. Namun tidak digunakan sebaik mungkin oleh masyarakat”.*

Selain itu bapak Syamsuar pada Kamis 11 Februari 2021 selaku Ketua Badan Permusyawaratan Kampung juga menambahkan bahwa:

*“Dan menurut saya seharusnya hal ini harus disosialisasikan ke masyarakat apa fungsi dari unit simpan pinjam dari BUMKAM ini agar kedepannya tidak disalahgunakan lagi oleh pihak masyarakat”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa mengenai perkembangan Badan Usaha Milik Kampung Teluk Rimba belumlah berjalan dengan baik, hal itu dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui fungsi dari unit simpan pinjam itu sendiri, sehingga hasil dari uang yang dipinjam tidak digunakan untuk modal usaha melainkan di konsumtif sehingga terjadi kendala pada pembayaran cicilan setiap bulannya.

Disisi lain Pendamping Lokal Desa Teluk Rimba yakni Bapak Setiyawan Rabu 17 Februari 2021 mengatakan bahwa:

*“Alhamdulillah saat ini perkembangan BUMKAM di Kampung Teluk Rimba sudah mulai berjalan lagi mulai dari tahun 2020 ini, walaupun sempat macet pada tahun 2018 tapi sekarang mulai berjalan baik lagi walaupun masyarakat yang meminjam hanya sedikit tapi kita usahakan agar BUMKAM kita bisa lebih optimal lagi seperti pada tahun 2015 sampai 2018 kemaren”.*

Selain itu Bapak Setiyawan pada rabu 17 Februari 2021 selaku Pendamping Lokal Desa juga menambahkan bahwa:

*“Sebenarnya BUMKAM ini bisa sangat membantu masyarakat kampung kita ini jika mereka bisa menggunakannya dengan baik. Misalnya digunakan sebagai modal usaha kecil-kecilan dan lain sebagainya. Dan sekarang kan di dusun segintil sudah ada usaha ternak madu dan itu sangat menunjang perekonomian masyarakat itu bisa membantu untuk pembayaran cicilan dari unit simpan pinjam yang masyarakat kita gunakan, selain itu kan masyarakat kita juga sudah dibantu dengan hasil koperasi sawit rimba mutiara banso, kan itu juga bisa membantu”.*

Hal ini senada dengan masyarakat kampung Teluk Rimba yaitu Bapak Syahrizal selaku masyarakat yang meminjam uang di unit simpan pinjam BUMKAM Rimba Mandiri pada Sabtu 20 Februari 2021 menyatakan bahwa:

*“ Alhamdulillah berkat simpan pinjam dari desa saya bisa membuka usaha kedai sembako yang besar di dusun segintil bermula dari kedai minyak kecil*

*sekarang menjadi kedai sembako. Saya tidak perlu lagi pergi ke kebun karet cukup duduk diam di kedai sudah bisa membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga saya”.*

Namun disisi lain masyarakat kampung Teluk Rimba yaitu Bapak Razid pada Sabtu 20 Februari 2021 mengatakan bahwa:

*“Menurut saya peminjaman uang di simpan pinjam kampung itu cicilannya sangat berat, proses peminjamannya juga susah dan juga dibatasi hanya bisa 15 juta dan jika kita melakukan tunggakan akan dikenai biaya bunga. Jadi lebih baik pinjam uang di Bank selain prosesnya cepat bunga nya juga ringan jadi bisalah kita mencicil dengan hasil karet dan sawit”.*

Dalam hal ini Ibu Suryani selaku masyarakat kampung yang pernah melakukan pinjaman uang di BUMKAM Rimba Mandiri pada Sabtu 20 Februari 2021 juga mengatakan bahwa:

*“ Iya saya juga pernah melakukan pinjaman uang di simpan pinjam kampung untuk sekolah anak dan sebagian saya gunakan untuk merawat kebun sawit”.*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa mengenai perkembangan Badan Usaha Milik Kampung Teluk Rimba yang belum berjalan dengan optimal karena ketidaktahuan masyarakat dan tingginya cicilan bunga dari simpan pinjam sehingga membuat masyarakat lebih banyak untuk melakukan pinjaman ke Bank dari pada di unit simpan pinjam BUMKAM kampung Teluk Rimba.

Berdasarkan hasil observasi penulis diketahui bahwa dalam meningkatkan pengembangan Badan Usaha Milik Kampung di Teluk Rimba belumlah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang menunggak dalam hal pembayaran cicilan sehingga membuat unit simpan pinjam BUMKAM yang terhenti. Selain itu karena ketidaktahuan masyarakat mengenai fungsi dari unit simpan pinjam BUMKAM tersebut dan karena proses peminjaman yang sulit dan dibatasi, dan karena cicilan bunga yang tinggi banyak masyarakat yang lebih memilih untuk melakukan peminjaman di Bank dari pada di unit simpan pinjam BUMKAM kampung Teluk Rimba.

#### **6. Perataan**

Perataan dapat dikatakan memiliki arti sebagai keadilan yang diperoleh dan diberikan kepada sasaran kebijakan publik. William M. Dunn (2003) (dalam Letjiu. dkk, 2014: 519) menjelaskan bahwa perataan berhubungan dengan social dan rasionalitas yang menunjukkan pada akibat dan usaha antar kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Dalam hal ini perataan dapat diartikan sebagai pemberian hasil yang maksimal secara menyeluruh berdasarkan tugas dan fungsinya. Perataan dalam penelitian ini menunjukkan bagaimana upaya Pendamping Lokal Desa dalam meningkatkan Pembangunan kampung di Teluk Rimba Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.

### ❖ Meningkatkan Pembangunan Berskala Lokal Desa

Meningkatkan pembangunan berskala lokal desa merupakan salah satu tugas dari Pendamping Lokal Desa. Karena wilayah kerja dari Pendamping Lokal kampung ini adalah di kampung maka fokus pembangunan berskala lokal desa kampung Teluk Rimba ini adalah terfokus pada pembangunan infrastrukturnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penelitian di kampung Teluk Rimba Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak ini dalam hal meningkatkan pembangunan berskala lokal desa bisa dikatakan baik. Karena hal ini sejalan dengan wawancara dengan Bapak Setiyawan pada Rabu 17 Februari 2021, beliau mengatakan bahwa:

*“Pada saat ini pembangunan di kampung Teluk Rimba sudah mulai meningkat. Hal ini dapat kita lihat dari pembangunan infrastruktur di desa kita misalnya seperti pembangunan jalan, masjid, sekolah, dan jembatan. Hal ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat”.*

Hal senada juga dijelaskan oleh Bapak Mubarak selaku Penghulu Kampung Teluk Rimba dalam wawancara pada Kamis 11 Februari 2021, beliau menjelaskan bahwa:

*“beberapa tahun ini pembangunan di kampung kita ini sangat bagus dan itu merupakan pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat kita, dan saat ini pembangunan kampung kita lebih terfokus pada pembangunan di Dusun Segintil agar kedepannya tidak ada lagi kecemburuan social antara masyarakat Dusun Segintil terhadap Dusun Banso”.*

Dalam hal ini Kerani yaitu Bapak Rudi Purnawas pada Kamis 11 Februari juga mengungkapkan bahwa:

*“Pembangunan kampung ini baik karena kita sebagai perangkat kampung dalam membuat perencanaan pembangunan kita melibatkan tokoh masyarakat, jadi setiap rapat Musrembang tahunan kita mengundang tokoh-tokoh masyarakat dan kita musyawarah bersama hal apa yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat dalam pembangunan ini, jadi kami mendengarkan apresiasi dari masyarakat”.*

Dari hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa dalam hal meningkatkan pembangunan skala lokal desa di kampung Teluk Rimba sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari bangunan-bangunan infrastruktur yang dibangun di kampung Teluk Rimba tersebut.

Dalam hal ini Bapak Arjunalis selaku masyarakat kampung Teluk Rimba pada Sabtu 20 Februari 2021 juga mengatakan bahwa:

*“Pembanguna di kampung ini menurut saya sudah bagus karena apa yang kami harapkan dari dulu akhirnya tercapai, misalnya seperti sekolah dan jembatan penyeberangan”.*

Selain itu Bapak Arjunalis selaku masyarakat kampung Teluk Rimba pada Sabtu 20 Februari 2021 juga menambahkan bahwa:

*“Sama-sama kita ketahui lah ya dulu kan dusun kita ini tidak ada sekolah anak-anak dusun kita pun harus sekolah di desa sungai selodang kecamatan sungai Mandau. Kan itu sangat susah selain jauh pun jalan rusak parah kalau hujan.*

*Jadi semenjak dibangun sekolah di dusun kita saya rasa itu sangat baik walaupun pembangunannya hanya selokah PAUD dan SD, tapi saya sangat bersyukur jadinya anak saya tidak jauh-jauh lagi untuk ke sekolah”.*

Hal senada juga diungkapkan oleh masyarakat kampung yaitu Bapak Khaidir selaku Kepala Dusun Segintil pada Sabtu 20 Februari 2021 mengatakan bahwa:

*“Kalau untuk saat ini pembangunan di kampung Teluk Rimba sudah sangat baik, terutama di Dusun Segintil ini, tahun 2020 lalu kita memperbaiki jalan yang rusak di dusun Segintil walapun hanya disirami kerikil tapi masyarakat kita sudah sangat bangga. Karena sejauh ini pembangunan di kampung Teluk Rimba hanya terfokus di dusun Banso dan kita sebagai masyarakat dusun Segintil merasa diabaikan oleh perangkat kampung”.*

Selain itu masyarakat kampung yakni Bapak Razid pada Sabtu 20 Februari 2021 juga menjelaskan bahwa:

*“ Dari tahun ke tahun pembanguna di Kampung Teluk Rimba sudah mulai membaik, hal ini dapat dilihat dari pembangunan jalan di dusun Segintil dan Pembuatan Sumur Bor untuk masyarakat”.*

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pembangunan lokal desa di kampung Teluk Rimba sudah dapat dikatakan dengan baik karena perubahan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Kantor kampung Teluk Rimba bahwa dalam hal meningkatkan pembangunan berskala lokal desa di kampung teluk rimba

sudah berjalan dengan baik. Karena dapat dilihat dari pembangunan infrastruktur di kampung Teluk Rimba khususnya di dusun Segintil, seperti pembangunan jalan, pembanguan sekolah, pembuatan air bersih sumur bor, pembangunan jembatan penyebrangan, dan pembuatan tempat berwudhu di Masjid. Dan dapat kita lihat bahwa pembangunan infrastruktur ini memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## **5.2 Faktor Penghambat Tugas Pendamping Lokal Desa Dalam Upaya Pembangunan Desa Teluk Rimba Kecamatan Koto Gasib.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penghulu Kampung Teluk Rimba yakni Bapak Mubarak pada hari Kamis 11 Februari 2021 menjelaskan bahwa Pendamping Lokal Desa Teluk Rimba tidak disiplin hal ini dapat dilihat dari sangat jarang datang ke kampung Teluk Rimba. Beliau mengatakan bahwa:

*“Gimana mau meningkatkan Pembangunan Desa jika Pendamping Lokal Desa di Kampung kita ini tidak disiplin, jangan datang telat masuk kantor untuk meninjau perkembangan pun tidak”*

Namun Pendamping Lokal Desa Kampung Teluk Rimba yakni Bapak Setiyawan pada Rabu 17 Februari 2021, beliau menjelaskan bahwa memang jarang masuk dikarenakan:

*“Saya jarang masuk itu karena saya sendiri sebagai Pendamping Lokal Desa tidak hanya mengurus satu kampung Teluk Rimba saja, tapi kampung yang saya urus itu tiga kampung sehingga sulit bagi saya apabila harus terfokus ke kampung Teluk Rimba saja”.*

Selain itu Bapak Setiyawan sebagai Pendamping Lokal Desa Kampung Teluk Rimba pada Rabu 17 Februari 2021, beliau juga menjelaskan kendala yang menyebabkan terhambatnya dalam menjalankan tugasnya, yaitu”

*“Saya bertugas di kampung Buatan I, Buatan II, dan Teluk Rimba. Diantara ketiga kampung itu desa Teluk Rimba sangat jauh, selain itu jarak tempuh yang jauh jalanan yang rusak juga menjadi kendala, jika hujan jalan itu tidak bisa dilewati”.*

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa faktor yang menjadi penghambat tugas Pendamping Lokal Desa dalam upaya pembangunan desa di kampung Teluk Rimba adalah jarak tempur antar desa yang jauh dan jalan yang tidak memadai.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Kantor Desa Teluk Rimba bahwa bahwasannya faktor penghambat Tugas Pendamping Lokal Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Teluk Rimba Kecamatan Koto Gasib adalah sebagai berikut:

1. Faktor jumlah tenaga Pendamping Lokal Desa yang tidak sesuai dengan jumlah Kampung yang di damping. Di Kecamatan Koto Gasib terdapat sebelas Kampung dengan hanya tiga Pendamping Lokal Desa.
2. Faktor jarak tempuh antar kampung yang jauh dan kondisi jalan yang tidak memadai sehingga membuat Pendamping Lokal Desa kesulitan untuk menjangkaunya.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Mengenai tugas Pendamping Lokal Desa di Teluk Rimba pada dasarnya belum berjalan sebagaimana mestinya, dimana dalam hal ini keberadaan Pendamping Lokal Desa di Teluk Rimba masih belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kemampuan pemerintah desa Teluk Rimba. Baik itu dalam hal kapasitas maupun efektifitasnya.

Berdasarkan observasi dan hasil wawancara dengan berbagai informan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam pembangunan desa terutama dalam bidang pembangunan infrastruktur desa Teluk Rimba sudah dapat dikatakan cukup baik, karena hal ini dapat dilihat dari pembangunan-pembangunan infrastruktur di desa seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan penyebrangan, pembangunan sekolah dan lain sebagainya.
2. Namun sejauh ini dalam pembangunan desa dari segi pembangunan ekonomi desa Teluk Rimba belum berjalan dengan optimal karena masih banyak terdapat masyarakat yang perekonomiannya yang dikategorikan masyarakat kurang mampu. Selain itu program untuk menunjang perekonomian di desa Teluk Rimba juga tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat dari program pembangunan ekonomi yaitu unit simpan pinjam dari BUMDes Rimba Mandiri yang tidak berjalan dengan baik.

3. Selain itu faktor yang menjadi penghambat tugas Pendamping Lokal Desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Kampung Teluk Rimba Kecamatan Koto Gasib adalah jumlah tenaga Pendamping Lokal Desa yang tidak sesuai dengan jumlah Kampung yang di damping. Di Kecamatan Koto Gasib terdapat sebelas Kampung dengan hanya tiga Pendamping Lokal Desa. Selain dari faktor tenaga faktor jarak tempuh antar kampung yang jauh dan kondisi jalan yang tidak memadai sehingga membuat Pendamping Lokal Desa kesulitan untuk menjangkaunya.

## 6.2 Saran

Adapun saran yang dapat dijadikan masukan sebagai Evaluasi Tugas Pendamping Lokal Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa Di Teluk Rimba adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya penambahan tenaga Pendamping Lokal Desa di setiap Kecamatan, jika bisa setiap Kampung di kecamatan memiliki satu Pendamping Lokal Desa sehingga upaya untuk meningkatkan pembangunan desa di setiap Kampung dapat terlaksana dan tercapai dengan optimal.
2. Perlu adanya Perbaikan pembangunan jalan disetiap Kampung agar memudahkan akses untuk keluar masuk kampung yang jaraknya jauh dari pusat kota. karena pembangunan jalan merupakan bagian utama dalam pembangunan desa hal ini sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat kampung.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Basrowi, Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bugin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Creswell, John.W. 2014. *Penelitian Kualitatif & Desai Riset (Memilih Diantara Lima Pendekatan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Ndraha, Taliziduhu. 2010. *Kybernologi Sebagai Sebuah Rekontruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomin Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono.2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Syafiie, Inu Kencana. 2016. *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi Keempat*. Jakarta: Bumi Aksara.

Widada. 2007. *Mengenal Pemerintahan Daerah*. Kalimantan Barat: PT Maraga Borneo Taringas

Zulkifli. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, dan Kertas Kerja Mahasiswa*. Pekanbaru: Badan Penerbit Fisipol Uir.

**Jurnal:**

Leju, Agustinus. Masjaya. Bambang Irawan. 2014. *Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transmigrasi di Kabupaten Mahakam Ulu (Studi pada Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu)*. *Jurnal Administrative Reform*. Vol. 2, No. 4, (2014), Hal 515-526.

Mais, Ririn. Daud Liando. Fanley Pangemanan. 2019. *Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Reward dan Punishment Aparatur Sipil Negara di Kota Bitung*. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*. Vol. 3, No. 3, (2019), Hal. 1-9.

Monalisa, Debi. 2015. *Evaluasi Wewenang Camat Dalam Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Pulau Busuk Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013)*. *Jurnal Jom FISIP*. Vol. 2, No. 1, Februari (2015). Hal 1-15.

Noor, Munawar. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat*. *Jurnal Ilmiah Civis*. Vol. 1, No. 2, Juli (2011), Hal. 87-99.

Sari, Anis Gita. AUFARUL MAROM. 2019. *Evaluasi Program Keluarga Harapan dalam Rangka mengatasi Permasalahan Pendidikan dan Kesehatan di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang*. *Journal of Public Policy and Management Review*. Vol. 9, No. 1, (2019), Hal. 17-29.

Syafhendry. Delpi Susanti. 2018. *Evaluasi Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu*. Jurnal Kajian Pemerintahan. Vol. IV, No. 1, Maret (2018), Hal. 22-38.

Triyanto, Deni. 2018. *Analisis Kinerja Pendamping Desa dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa (Studi di Desa Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah*. Jurnal Penelitian Sosial dan Politik, Vol. 7, No. 2, Desember (2018), Hal. 56-62.

Yuslaini, Nina. Septa Juliana. 2019. *Evaluasi Program Pendamping Desa di Kabupaten Bengkalis*. Jurnal Wedana, Vol. V, No. 2, Oktober (2019), Hal. 7-15.

**Skripsi:**

Maria Christina. 2017. *Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam Peningkatan Pembangunan Desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah*. Laporan Penelitian S1 Ilmu Pemerintahan. Universitas Lampung.



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

جامعة الإنشادية البريوتية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284  
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

### SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : /35/IA-UIR/5-FS/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : lyusnia  
NPM : 177310732  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Judul Skripsi : Evaluasi Tugas Pendamping Lokal Desa dalam Upaya  
Pembangunan Desa di Teluk Rimba Kecamatan Kota Gasib  
Kabupaten Siak  
Persentase Plagiasi : 16%  
Jumlah Halaman : **102 (Abstrak s/d Daftar Pustaka)**  
Status : **Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi,  
dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 31 Maret 2021

Hormat Kami,  
Wakil Dekan Bid. Akademik



*[Signature]*  
**Indra Safri, S.Sos., M.Si**  
NPK. 970702230